LAPORAN AKHIR

KAJIAN KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN MELALUI PEMBERDAYAAN HOME INDUSTY DI KOTA TASIKMALAYA

Disusun Oleh:

Fitriyani Yuliawati, S.IP., M.Si

Taufik Nurohman, S.IP., M.A

Riska Sarofah, S.IP., M.I.P

Hilal Ramdhani, S.Pd., M.I.P

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Tasikmalaya

2023

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN 4

1.1 Latar Belakang Masalah 4

1.2 Perumusan Masalah 8

1.3 Tujuan Penelitian 9

1.4 Luaran Penelitian 9

1.5 Urgensi Penelitian 10

BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN ROADMAP PENELITIAN 11

2.1 Tinjauan Kolaborasi Pemerintah dan Penanggulangan Kemiskinan 11

2.2 Ruang Lingkup Home Industry 16

2.3 Tinjauan Kebijakan Home Industry 19

2.4 Tinjauan Pemberdayaan Masyarakat 20

BAB III METODE PENELITIAN 24

3.1 Prosedur Penelitian 24

3.2 Populasi dan Sampel Penelitian 27

3.3 Operasional Variabel 30

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 35

4.1 Hasil Penelitian 35

4.1.1 Uji Validitas dan Reliabilitas 35

4.1.2 Data Responden 38

4.1.3 Hasil Survey Kebijakan Kolaborasi Pemerintah dalam Penanggulangan Kemiskinan Melalui Home Industry 42

4.1.4 Hasil Survey Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat melalui

Home Industry di Kota Tasikmalaya 60
4.2 Pembahasan 67
4.2.1 Kajian Kebijakan Kolaborasi Pemerintah 67

BAB V PENUTUP 79
5.1 Kesimpulan 79
5.2 Rekomendasi 80

DAFTAR PUSTAKA 81

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Isu kemiskinan menjadi prioritas utama pemerintah baik di tingkat nasional maupun daerah (Asmorowati, Schubert, & Ningrum, 2022). Memecahkan masalah kemiskinan memerlukan proses dan strategi yang metodis, terpadu, dan menyeluruh. Tujuan dari pembangunan yang inklusif, adil, dan berkelanjutan adalah untuk meringankan permasalahan dan mencukupkan hak-hak dasar warga negara dengan cara yang mempromosikan kehidupan yang bermartabat. Ada lima elemen kemiskinan yang saling terkait: kemiskinan, ketidakberdayaan, kerentanan terhadap keadaan darurat, ketergantungan, dan keterasingan (Aspiranti & Amaliah, 2018). Oleh karena itu, kemiskinan dipandang sebagai masalah yang kompleks dengan komponen sosial, ekonomi, fisik, politik, dan kelembagaan. Penanggulangan kemiskinan membutuhkan tindakan nyata dan keterlibatan berbagai pihak, termasuk pemerintah dan segmen masyarakat.

Orang miskin didefinisikan sebagai orang yang memiliki pengeluaran atau pendapatan per kapita bulanannya berada di bawah garis kemiskinan, dan orang yang hampir miskin adalah mereka yang hidup tepat di atasnya. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan pada Juli 2019 bahwa jumlah orang miskin di Indonesia menurun. Dari 26,58 juta (10,12 persen) menjadi 25,95 juta (9,82 persen). Menurut BPS, hal ini disebabkan oleh kenaikan 87,6 persen bantuan sosial tunai pemerintah selama tiga bulan pertama tahun 2018, yang berkontribusi terhadap peningkatan daya beli keluarga sebesar 3,06 persen dari September 2017 hingga Maret 2018. Proporsi penduduk miskin dan rentan Indonesia tetap konstan pada sekitar 40 persen dari seluruh populasi (TNP2K, 2018).

Berbagai studi menunjukkan bahwa ada kesejajaran dan variasi antara kemiskinan pedesaan dan perkotaan. Secara umum, masyarakat miskin perkotaan dan pedesaan memiliki tingkat pendidikan dan keterampilan yang rendah, akses

terbatas ke sumber daya, dan tidak adanya perlindungan sosial. Sebagai aturan, perbedaannya terbatas pada kaum miskin perkotaan, khususnya penciptaan lingkungan kumuh dengan perumahan yang tidak sah dan pendapatan rendah. Perbedaan utama antara kaum miskin perkotaan dan pedesaan adalah sarana penghidupan, kepadatan penduduk, dan homogenitas demografis mereka (Iskandar, Mahmud, dan Muslim 2015).

Kesamaan lain antara kemiskinan pedesaan dan perkotaan adalah pengaruh informalitas. Secara umum, masyarakat miskin pedesaan dan perkotaan tidak terorganisir dengan baik, acuh tak acuh, dan memiliki pemahaman yang terbatas tentang hak-hak mereka. Dari sini terlihat jelas bahwa masyarakat miskin telah memiliki modal sosial budaya yang dapat dijadikan sebagai landasan untuk meningkatkan ketahanan sosial budaya mereka.

Tidak hanya tempat pedesaan dan perkotaan yang berbeda secara geografis, tetapi ada juga perbedaan budaya yang diantisipasi untuk memanifestasikan dirinya dalam metode ketahanan sosial budaya yang berbeda. Dalam konteks ini, resiliensi mengacu pada kapasitas orang, keluarga, dan komunitas untuk mengatasi kesulitan dan beradaptasi dengan perubahan dan masalah (Theron, LC, & Theron 2013).

Kota Tasikmalaya adalah salah satu wilayah di Jawa Barat dengan presentase angka kemiskinan yang tinggi. Indeks angka kemiskinan Kota Tasikmalaya berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) terakhir berada di kisaran 11.3 persen. Namun, saat dibandingkan dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), kemudian serapan program sosial seperti Kartu Indonesia Sehat (KIS), Penerima Bantuan Iuran (PBI), datanya ada di atas 60 persen. Pada tahun 2018 Kota Tasikmalaya ditetapkan sebagai wilayah dengan jumlah penduduk miskin tertinggi di Jawa Barat, kondisi tersebut masih bertahan pada tahun 2021.

Tingkat kemiskinan di Kota Tasikmalaya pada tahun 2022 turun sebesar 12,72 %, dengan total penduduk miskin sebesar 87.130 dan garis kemiskinan Rp. 498.711,- per kapita per bulan. Adapun indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)

sebesar 2,34 dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) sebesar 0,65. Hal ini berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) pada Maret 2022.

Komitmen pemerintah untuk melaksanakan program penanggulangan kemiskinan diatur dalam peraturan daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penanggulangan kemiskinan. Dalam perda ini dijelaskan bahwa kemiskinan adalah kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Sementara penanggulangan kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan Pemerintah Daerah Kota yang dilakukan secara sistematis, terencana dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah Penduduk Miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat. Salah satu program penanggulangan kemiskinan di Kota Tasikmalaya adalah program pemberdayaan masyarakat dan penguatan pelaku usaha mikro dan kecil, yang bertujuan untuk memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dan mengambil manfaat dari proses pembangunan.

Program penanggulangan kemiskinan dalam pemberdayaan masyarakat tentunya harus sejalan dengan rencana pembangunan industry Kota Tasikmalaya. Pemerintah Kota Tasikmalaya mengeluarkan Peraturan Kota Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Industri Kota Tasikmalaya Tahun 2021-2041. Terdapat beberapa industri unggulan daerah Kota Tasikmalaya, antara lain:

No.	Industri Unggulan Daerah
1.	Industri pakaian jadi sulaman/bordir
2.	Industri makanan dan minuman
3.	Industri pakaian jadi (konveksi) dari tekstil
4.	Industri alas kaki, yaitu sendal, sepatu dan kelom geulis
5.	Industri batik
6.	Industri kayu dan furnitur dari kayu

7.	Industri pengolahan lainnya, yaitu payung geulis
8.	Industri barang anyaman dari tanaman bukan rotan dan bambu, yaitu mendong
9.	Industri barang anyaman dari bambu.

Sumber: Peraturan Kota Tasikmalaya, 2022

Melalui kelengkapan industry unggulan daerah diatas, didapatkan data dari Dinas Koperasi, UMKM dan Industri tentang persebaran dari industri di Kota Tasikmalaya sebagai berikut:

No.	**Jenis Industri**	**Jumlah Industri Tahun 2021**		
		Kecil (Unit)	**Menengah (unit)**	**Jumlah (unit)**
1	Bordir	1.311	112	1423
2	Kerajinan Mendong	173	1	174
3	Kerajinan Bambu	74	1	75
4	Alas Kaki (Sandal, Sepatu, Kelom Geulis)	548	22	570
5	Kayu Olahan (Meubel)	223	3	226
6	Batik	41	2	43
7	Payung Geulis	8	0	8
8	Makanan Olahan	1.049	17	1066
9	Bahan Bangunan	313	13	326
10	Pakaian Jadi	327	10	337
11	Percetakan	54	4	58
12	Lain-lain	124	20	144
JUMLAH		**4.245**	**205**	**4450**

Sumber: Dinas Koperasi, UMKM dan Industri, 2022.

Keberadaan usaha kecil dan menengah diatas sebenarnya cukup banyak dan semestinya sebanding dengan upaya penanggulangan kemiskinan melalui home industry tersebut. Namun, perlu juga diteliti lebih lanjut apakah keberadaan industry-industry tersebut memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat miskin di Kota Tasikmalaya. Pendekatan ini bisa dilakukan melalui pendekatan kolaborasi. Kolaborasi antara masyarakat, asosiasi industry dan pemerintah daerah. Keberadaan industry yang banyak bisa saja tidak dapat termonitoring dengan baik apabila sasaran kebijakan tidak diperhatikan secara bersama.

Dengan latar belakang tersebut, Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kota Tasikmalaya akan melaksanakan kegiatan kajian akademis tentang kajian kebijakan penanggulangan kemiskinan melalui pemberdayaan home industy yang diharapkan dapat mengidentifikasi issue/permasalahan terkait dengan kemiskinan di Kota Tasikmalaya agar sesuai dengan prinsip-prinsip masyarakat madani serta menghindari predikat buruk yang diberikan masyarakat terhadap pelaksanaan penanggulangan kemiskinan yang dilakukan pemerintah Kota Tasikmalaya.

1.2 Perumusan Masalah

Merujuk pada latar belakang masalah diatas, maka pertanyaan utama penelitian adalah Bagaimana upaya kolaborasi pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan melalui pemberdayaan home industry?

Secara khusus rumusan masalah dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Bagaimana kondisi awal pemberdayaan home industry dalam penanggulangan kemiskinan?
2. Bagaimana proses kolaborasi kebijakan perberdayaan home industry dalam penanggulangan kemiskinan?
3. Bagaimana pemberdayaan home industry dalam penanggulangan kemiskinan di Kota Tasikmalaya?

1.3 Tujuan Penelitian

Maksud kegiatan adalah untuk memenuhi kebutuhan kajian akademis tentang kajian kebijakan penanggulangan kemiskinan melalui pemberdayaanhome industy, serta bermaksud memberikan suatu rekomendasi bagi stakeholdersdalam membuat suatu kebijakan yang dapat menanggulangi kemiskinan di Kota Tasikmalaya.

Tujuan kegiatan adalah sebagai referensi tambahan bagi stakeholders dalam merencanaan kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kota Tasikmalaya agar berjalan secara optimal dan sesuai dengan prinsip-prinsip kolaborasi. Secara spesifik tujuan penelitian adalah menjawab rumusan sebagai berikut:

1. Untuk mengidentifikasi kondisi awal pemberdayaan home industry dalam penanggulangan kemiskinan
2. Untuk mengidentifikasi proses kolaborasi kebijakan pemberdayaan home industry dalam penanggulangan kemiskinan.
3. Untuk mengidentifikasi pemberdayaan masyarakat berbasis home industry dalam penanggulangan kemiskinan

1.4 Luaran Penelitian

1. Tersedianya kajian akademis tentang bagaimana Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan melalui Pemberdayaan Home Industy dalam rangka pengurangan angka kemiskinan di Kota Tasikmalaya.
2. Tersedianya data dan informasi sebagai referensi tambahan bagi stakeholder di Kota Tasikmalaya dalam melaksanakan penanggulangan kemiskinan agar berjalan secara optimal dan sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik.
3. Tersedianya hasil penelitian yang akan dipublikasikan pada jurnal nasional bereputasi (terakreditasi Kemendikbudristek).

1. 5 Urgensi Penelitian

Penelitian ini merupakan salah satu bentuk identifikasi bentuk kolaborasi yang dapat dilakukan oleh masyarakat terutama pasca covid 19 yang membutuhkan peran pemulihan ekonomi, salah satunya peran masyarakat dalam mengisi sektor home industry di Kota Tasikmalaya. Namun pemberdayaan masyarakat perlu direspon dengan kebijakan yang tepat sebagai salah satu upaya pemberdayaan ekonomi rakyat. Kebijakan ini diantaranya :

1. Membantu masyarakat mengembangkan kegiatan home industry sebagai bagian dari kesejahteraan masyarakat.
2. Membantu masyarakat menfasilitasi dalam kegiatan pemberdayaan home industry
3. Membantu peningkatan pendapatan masyarakat melalui produk unggulan daerah.

BAB II
KAJIAN PUSTAKA DAN ROADMAP PENELITIAN

2.1 Tinjauan Kolaborasi Pemerintah dan Masyarakat dalam Pengentasan Kemiskinan

Kemiskinan merupakan suatu keadaan dimana tidak bisa mengakses segala bentuk kebutuhan baik adari bidang sosial, politik, ekonomi, pendidikan, dan lain sebagainya. Menurut Chambers, kemiskinan merupakan suatu integrated concept yang memiliki lima dimensi diantaranya adalah
; kemiskinan (proper), ketidakberdayaan (powerless), kerentanan menghadapi situasi darurat (state of emergency) ketergantungan (dependence), dan keterasingan (isolation) baik secara geografis maupun sosiologis (Hudayana, I., & Nurhadi, N, 2020).

Penelitian terkait dengan collaborative governance dalam pengentasan kemiskinan di antaranya penelitian dengan judul, ”Collaborative Governance dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir Untuk Pengentasan Kemiskinan di Desa Kohod” yang di tulis oleh Siti Yulyanah dan Riska Sarofah dalam penelitiannya memiliki hasil penelitian bahwa collaborative governance efektif diterapkan dalam upaya pengentasan kemiskinan. Dalam penelitian ini stakeholder yang terlibat adalah OASE (Organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Kerja), Pemerintah Pusat dan Daerah, hingga Pemerintah Desa bersama dengan pihak swasta melaui CSR saling berkolaborasi bersama untuk memberdayakan masyarakat meskipun belum menghasilkan penurunan angka kemiskinan yang signifikan namun menunjukkan proses kolaborasi membuat masyarakat menjadi mandiri dan memiliki infrastruktur yang cukup memadai (Yulyanah & Sarofah, 2019).

Selain itu dalam penelitian yang berjudul “Strategi Tata Kelola Kolaboratif antara Aktor Pemerintah dan Non Pemerintah Dalam Pengentasan Kemiskinan,” menjelaskan bahwasanya tata kelola kolaboratif yang dilakukan oleh Grameen Bank di Bangladesh bahwa konsep mendasar dalam pengentasan

kemiskinan dapat di dorong memlalui pemberdayaan masyarakat melalui mekanisme social collateral, sistem ini membentuk sistem ketahanan sosial masyarakat (Salsabila, L., & Sadayi, D. P, 2022).

Kolaborasi yaitu suatu kegiatan yang secara fundamental terletak pada pengelolaan jaringan sosial. Jaringan sosial yakni hubungan simpul-simpul komunikasi para pemangku kepentingan. Atas pemahaman tersebut dapat disimpulkan bahwa teori kolaborasi yakni analisis dari proses tata kelola dengan sudut pandang pada jaringan sosial. Model tata kelola kolaboratif mengharuskan seluruh pemangku kepentingan terlibat dalam dialog, dimana para pemangku kepentingan ini mewakili diri mereka sendiri dalam mengungkapkan kepentingannya (Booher dan Innes, 2006).

Collaborative governance adalah serangkaian pengaturan dimana satu atau lebih lembaga publik yang melibatkan secara langsung Pemangku kepentingan "non-state" di dalam proses pembuatan kebijakan yang bersifat formal, berorientasi konsensus dan deliberatif yang bertujuan untuk membuat atau mengimplementasikan kebijakan publik atau mengatur program publik atau aset (Ansell dan Gash, 2008).

Memahami collaborative governance adalah memahami kolaborasi antar lintas sektor dapat dilihat pada penekanan lima hal, antara lain:

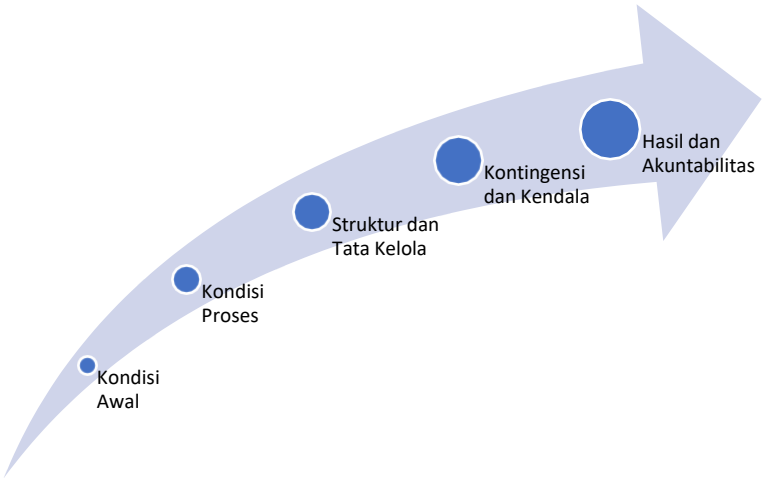

Sumber: (Bryson et al., 2006).

Ansell dan Gash dalam jurnalnya Collaborative Governance in Theory and Practice merumuskan model collaborative governace berdasarkan kajian literatur. Hasil kesimpulan kajian tersebut digambarkan dalam 4 (empat) variabel utama, yakni: terdiri dari:

1. Kondisi awal;
2. Desain kelembagaan;
3. Kepemimpinan
4. Proses kolaboratif

Gambar Proses Kolaborasi

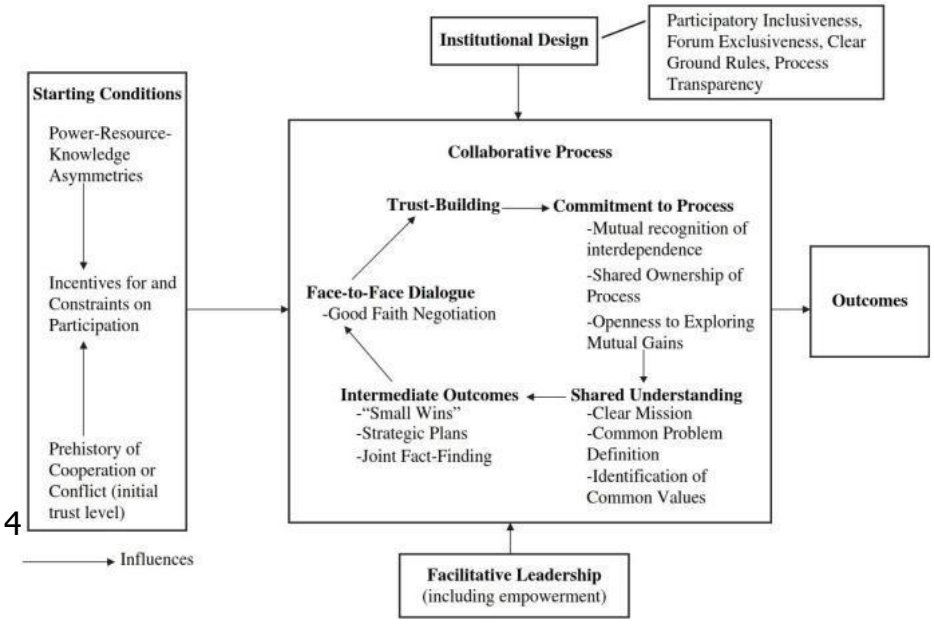

Sumber: (Ansell dan Gash, 2008).

Berikut adalah penjelasan dari gambar diatas:

1. Kondisi awal Kondisi di awal mempengaruhi sebelum proses kolaborasi terjadi, terdapat kondisi dimana dapat menjadi pendukung ataupun penghambat kerja sama antara pemangku kepentingan, dan antara lembaga/ organisasi dengan pemangku kepentingan. Terdapat 3 (tiga) variabel besar kondisi diawal ini antara lain: ketidakseimbangan antara

4

pengaruh/ kekuatan, sumber daya, pengetahuan pemangku kepentingan; sejarah di masa lalu yang terjadi baik berupa kerjasama yang telah dilakukan sebelumnya ataupun konflik yang pernah terjadi diantara pemangku kepentingan; dan bentuk dorongan dan kendala dalam ikut berpartisipasi dalam kolaborasi.

2. Desain Kelembagaan Desain kelembagaan merujuk pada bagaimana aturan dasar dalam berkolaborasi, hal ini menjadi sangat penting karena menjadi sebuah legitimasi secara prosedur dalam proses berkolaborasi. Hal yang ditekankan dalam desain kelembagaan ini adalah bagaimana aturan main dalam ikut berpartisipasi dalam kolaborasi, bagaimana forum yang dibentuk, bentuk aturan pelaksanaan yang jelas serta bagaimana adanya transparansi dalam proses pelaksanaan kolaborasi.
3. Kepemimpinan Dalam berkolaborasi sangat mungkin terjadi atau ditemukan adanya konflik/ perselisihan yang tinggi dan adanya ketidakpercayaan yang besar antara pemangku kepentingan, namun disisi lain biasanya terdapat keinginan yang besar pula para pemangku kepentingan untuk ikut berpatisipasi, maka disinilah dibutuhkan kepemimpinan yang dapat diterima dan dipercaya oleh para pemagku kepentingan yang dapat diandalkan sebagai mediator di dalam kolaborasi. Kepemimpinan yang kuat yakni dihormati dan dipercaya oleh semua pemangku kepentingan akan sangat dibutuhkan dalam sebuah kolaborasi karena akan lebih mungkin kolaborasi akan berhasil. Kepemimpinan yang kuat ini biasanya muncul dari komunitas para pemangku kepentingan itu sendiri.
4. Proses kolaboratif Awal dari proses kolaborasi sangat sulit ditentukan akan dimulai darimana. 4 proses kolaborasi antara lain:
    a. Dialog tatap muka Semua collaborative governance dibangun berdasarkan adanya "dialog antara para pemangku kepentingan". Dialog ini sebagai sebuah proses, yang berorientasi pada lahirnya konsensus/ kesepakan. Dialog pemangku kepentingan ini biasanya dilakukan untuk mengidentifikasi peluang dengan mengedepankan

narasi bahwa akan adanya keadaan "saling menguntungkan" para pemangku kepentingan bila dapat berkolaborasi.

b. Membangun kepercayaan Membangun kepercayaan tidak dapat dipisahkan dari proses dialog. Para pemimpin kolaborasi harus mampu membangun kepercayaan diantara para pemangku kepentingan. Proses dalam membangun kepercayaan merupakan proses jangka panjang yang memakan waktu dan membutuhkan komitmen yang tinggi.
c. Komitmen dalam proses kolaborasi Adanya kondisi saling ketergantungan yang tinggi diantara para pemangku kepentingan kemungkinan akan meningkatkan komitmen untuk berkolaborasi. Perlu ditekankan bahwa berkolaborasi bukanlah kesepakatan satu kali akan tetapi merupakan sebuah proses kegiatan kerjasama yangberkelanjutan dan saling menguntungkan.
d. Pemahaman bersama Pada titik tertentu, para pemangku kepentingan harus mampu mengembangkan pemahaman bersama tentang apa yang dapat dicapai.

Rasdi & Kurniawan (2019) menunjukkan bahwa kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha merupakan pendekatan yang layak untuk mengentaskan kemiskinan (public-private partnership). Kolaborasi antara sektor publik dan swasta mempengaruhi keberhasilan inisiatif untuk mengurangi kemiskinan, meskipun dalam pelaksanaannya sering terhambat oleh sejumlah tantangan dan hambatan. Kendala yang dihadapi tanpa adanya tujuan yang jelas dan kemungkinan kerugian lainnya. Dalam beberapa domain, seperti infrastruktur, pertumbuhan ekonomi kecil dan menengah, tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), kemitraan, dan upaya pemerintah sering digunakan untuk memerangi kemiskinan di negara-negara berkembang. Model kemitraan dengan konteks pembangunan ekonomi dapat digunakan untuk mencapai efektivitas kemitraan sebagai strategi pengentasan kemiskinan (Yunus & Parapat, 2021). Model ini mencakup dimensi seperti tujuan dan strategi kemitraan, aktor yang terlibat,

lokasi, waktu, dan mekanisme untuk mewujudkan kemitraan. Dimensi lain yang berlaku meliputi kesetaraan, inklusi sosial, dan pemberdayaan.

2.2 Ruang Lingkup Home Industry

Dalam kerangka pembangunan nasional industry rumah tangga menjadi unsur yang sangat penting. Home industry adalah rumah usaha produk barang yang biasa disebut dengan perusahaan kecil. Dikatakan kecil karena pusat kegiatan ekonomi dipusatkan di rumah. Industri rumahan pada umumnya memusatkan kegiatan keluarga tertentu yang berdomisi tidak jauh dari rumah.

Home industry atau industry rumah tangga memiliki beberapa ciri diantaranya sebagai berikut (Arshad dan Burhanuddin, 2023):

1. Suatu unit usaha yang tidak berbentuk badan hukum.
2. Dilaksanakan oleh seseorang atau beberapa anggota rumah tangga yang mempunyai tenaga kerja sebanyak empat orang atau kurang.
3. Kegiatan mengubah barang dasar menjadi barang jadi atau setengah jadi atau yang dari nilainya kurang menjadi yang lebih tinggi nilainya dengan tujuan untuk dijual atau ditukar dengan barang lain.
4. Terdapat satu anggota keluarga yang menanggung risiko.
5. Hanya menggunakan satu atau dua rumah sebagai pusat produksi, administrasi, dan pemasaran secara bersamaan.
6. Bila dilihat dari modal usaha dan jumlah tenaga kerja yang diserap lebih sedikit dari perusahaan-perusahaan besar.

Home berarti rumah, tempat tinggal ataupyn kampung halaman yang menjadi pusat Lembaga sosial dalam kehidupan manusia yang bersifat seimbang, tempat manusia mengadakan tatap muka dan membina hubungan kekeluargaan. Sedangkan industry dapat diartikan sebagai kerajinan, usaha produk barang, dan ataupun perusahaan. Secara singkat, home industry adalah rumah usaha produk barang atau juga perusahaan kecil. Dikatakan perusahaan kecil karena pusatnya di rumah.

Aturan mengenai home industry perlu dianalisis dengan menentukan kriterianya. Home industry mengacu pada usaha kecil. Jika pada aturan UU No. 9

tahun 1995 menyebutkan bahwa usaha dengan kekayaan bersih paling banyak Rp. 200 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha) dengan hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 1 Milyar. Kriteria lain menurut UU ini adalah milik warga negara Indonesia, berdiri sendiri, berafiliasi langsung, atau tidak langsung dengan usaha menengah atau besar atau berbentuk badan usaha perorangan, baik berbadan hukum atau tidak. Home industry juga berarti industry rumah tangga, karenatermasuk dalam kategori usaha kecil yang dikelola keluarga. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 bahwa usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendir, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usahayang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau besar yang memenuhi kriteria usaha kecil.

Aturan baru mengenai UMKM kemudian mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (PP UMKM) telah diterbitkan oleh pemerintah bersama 48 peraturan pelaksana lainnya dari Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) pada 16 Februari 2021 lalu. PP UMKM tersebut mengubah beberapa ketentuan yang sebelumnya telah diatur di dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UU UMKM). Salah satunya adalah aturan terkait kriteria UMKM itu sendiri.

Kriteria UMKM yang baru diatur di dalam Pasal 35 hingga Pasal 36 PP UMKM. Berdasarkan pasal tersebut, UMKM dikelompokkan berdasarkan kriteria modal usaha atau hasil penjualan tahunan. Kriteria modal usaha digunakan untuk pendirian atau pendaftaran kegiatan UMKM yang didirikan setelah PP UMKM berlaku. Kriteria modal tersebut terdiri atas:

1. Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha

2. Usaha Kecil rnemiliki modal usaha lebih dari Rpl.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha
3. Usaha Menengah merniliki modal usaha lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai tlengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh rniliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Sedangkan bagi UMKM yang telah berdiri sebelum PP UMKM berlaku, pengelompokkan UMKM dilakukan berdasarkan kriteria hasil penjualan tahunan. Kriteria hasil penjualan tahunan terdiri atas:

1. Usaha Mikro memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)
2. Usaha Kecil memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp15.000.000.000,00(lima belas miliar rupiah)
3. Usaha Menengah memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Nilai nominal kriteria di atas dapat diubah sesuai dengan perkembangan perekonomian. Selain kriteria modal usaha dan hasil penjualan tahunan, kementerian/lembaga negara dapat menggunakan kriteria lain seperti omzet, kekayaan bersih, nilai investasi, jumlah tenaga kerja, insentif dan disinsentif, kandungan lokal, dan/atau penerapan teknologi ramah lingungkan sesuai dengan kriteria setiap sektor usaha untuk kepentingan tertentu (Pasal 36 PP UMKM).

Menurut Tulus (2002) menyebutkan bahwa industry rumah tangga pada umumya adalah unit-unit usaha yang sifatnya lebih tradisional, dalam arti menerapkan sistem organisasi dan manajemen yang baik seperti lazimnya dalam usaha modern, tidak ada pembagian kerja dan sistem pembukuan yang jelas. Secara sederhana peneliti mengartikan home industry sebagai kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi

secara luas kepada masyarakat dan dapat berperan dalam perekonomian masyarakat serta pendapatan keluarga, mengurangi pengggangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2.3 Tinjauan Kebijakan Home Industry

Dalam pandangan umum, bahwa pembangunan home industry bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara adil dan merata dengan memanfaatkan dana, sumber daya alam, hasil budidaya serta dengan memperhatikan keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara bertahap untuk mewujudkan dasar yang lebih kuat dan lebih luas bagi pertumbuhan ekonomi pada umumnya, dan memberikan nilai tambah bagi pertumbuhan industry pada khususnya. Home indutry didalamnya terdapat kegiatan produktif yang mengolah bahan mentah menjadi bahan jadi atau barang setengah jadi melalui proses produksi penggarapan dalam jumlah besar, sehingga barang tersebut dapat diperoleh dengan harga serendah mungkin tetapi dengan mutu setinggi-tingginya (Riyansyah, F., Amiin, D. E. S., &Aziz, R, 2018).

Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan yaitu yang bersifat "people-centered,participatory, empowering, and sustainable." People centered merupakan tatanan kepemerintahan yang berorientasi pada kepentingan-kepentingan masyarakat dan dalam prosesnya pun dominan dilakukan oleh masyarakat.

Home berarti rumah, tempat tinggal, ataupun kampung halaman. Sedang Industry, dapat diartikan sebagai kerajinan, usaha produk barang dan ataupun perusahaan. Singkatnya, Home Industry adalah rumah usaha produk barang atau juga perusahaan kecil. Di katakan sebagai perusahaan kecil karena jenis kegiatan ekonomi ini di pusatkan dirumah.

Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak

perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. (Undang-undang No.20 Tahun 2008)

2.4 Tinjauan Pemberdayaan Masyarakat

Mengutip definisi yang dikemukakan oleh UNDP, Empowerment (pemberdayaan/penguatan) dianggap sebagai sebuah proses yangmemungkinkan kalangan individual ataupun kelompok merubah keseimbangan kekuasaan dalam segi sosial, ekonomi maupun politik pada sebuah masyarakat ataupun komunitas. Kegiatan pemberdayaan dapat mengacu pada banyak kegiatan, di antaranya adalah meningkatkan kesadaran akan adanya kekuatan- kekuatan sosial yang menekan orang lain dan juga pada aksi-aksi untuk mengubahpola kekuasaan di masyarakat. Sedangkan secara etimologis pemberdayaanberasal dari kata dasar "daya" yang berarti kekuatan atau kemampuan (Putra, 2007).

Pemberdayaan masyarakat pedesaan sebagai upaya pengentasan kemiskinan, pemerintah perlu memfasilitasi masyarakat pedesaan dalam merencanakan, memutuskan dan mengelola sumberdaya pedesaan yang dimiliki yang akhirnya mereka memiliki kemampuan dan kemandirian secara ekonomi, ekologi dan social. Pemberdayaan masyarakat memiliki keterkaitan erat dengan pengembangan dimana pemberdayaan masyarakat merupakan syarat utama agar dapat membawa masyarakat menuju suatu peningkatan ekonomi. Melalui upaya pemberdayaan, warga masyarakat didorong agar memiliki kemampuan untuk memanfaatkan sumberdaya yang dimilikinya secar optimal serta terlibat penuh dalam mekanisme produksi, ekonomi, social dan ekologinya (Sunyoto, Y, 2015).

Tanggung jawab utama dalam program pembangunan adalah masyarakat berdaya atau memiliki daya, kekuatan atau kemampuan. Kekuatan yang dimaksud dapat dilihat dari aspek fisik dan material, ekonomi, kelembagaan, kerjasama,

kekuatan intelektual dan komitmen bersama dalam menerapkan prinsip-prinsip pemberdayaan (Bahri, Z, 2013).

Dalam melaksanakan pemberdayaan perlu dilakukan melalui berbagai pendekatan. Menurut Suharto, penerapan pendekatan pemberdayaan dapat dilakukan melalui 5P yaitu: pemungkinan, penguatan, perlindungan,penyokongan, dan pemeliharaan, dengan penjelsan sebagai berikut (Suharto, E, 2009).

a. Pemungkinan; menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal.
b. Penguatan; memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Pemberdayaan harus mampu menumbuh kembangkan segenap kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat yang menunjang kemandirian mereka.
c. Perlindungan; melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar tidak tetindas oleh kelompok kuat. Oleh karena itu pemberdayaan harus iarahkan kepada penghapusan segala jenis diskriminasi dan dominasi yang tidak menguntungkan rakyat kecil.
d. Penyokongan; memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu menjalankan perannya dan tugastugas kehidupannya. Pemberdayaan harus mampu menyokong masyarakat agar tidak terjatuh kedalam keadaan dan posisi yang semakin lemah dan terpinggirkan.
e. Pemeliharaan; memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan ditribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Pemberdayaan harus mampu menjamin keselarasan dan keseimbangan yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatan berusaha.

2.5 Roadmap Penelitian

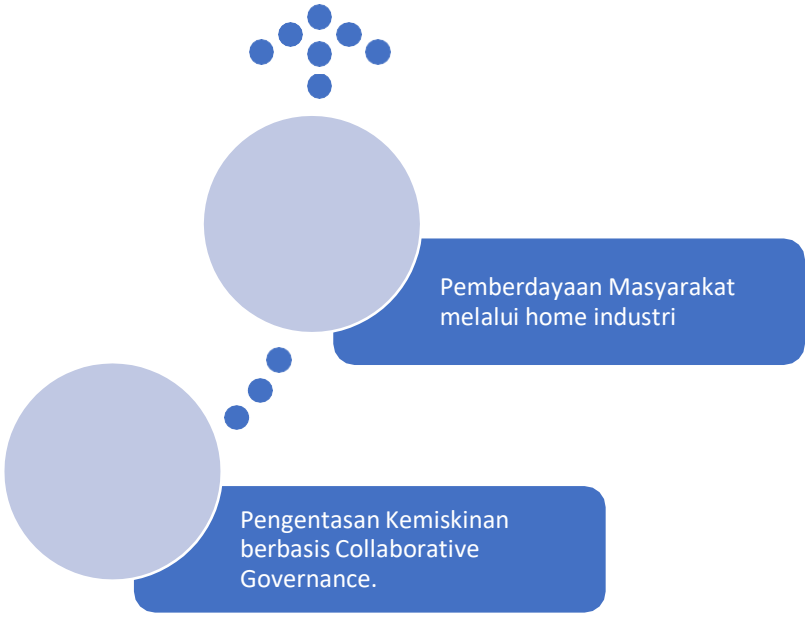

Adapun 4 variabel kolaborasi yang digunakan dalam mengoptimalkan pemberdayaan home industry antara lain:

1. Kondisi awal;
2. Desain kelembagaan;
3. Kepemimpinan
4. Proses kolaboratif

Sedangkan konsep pemberdayaan yang dikembangkan melalui 5P:

1. Pemungkinan
2. Penguatan
3. Perlindungan
4. Penyokongan
5. Pemeliharaan

Dalam menjawab masalah penelitian, peneliti mengembangkan melalui penyusunan roadmap penelitian yang sesuai dengan penelitian mix method.

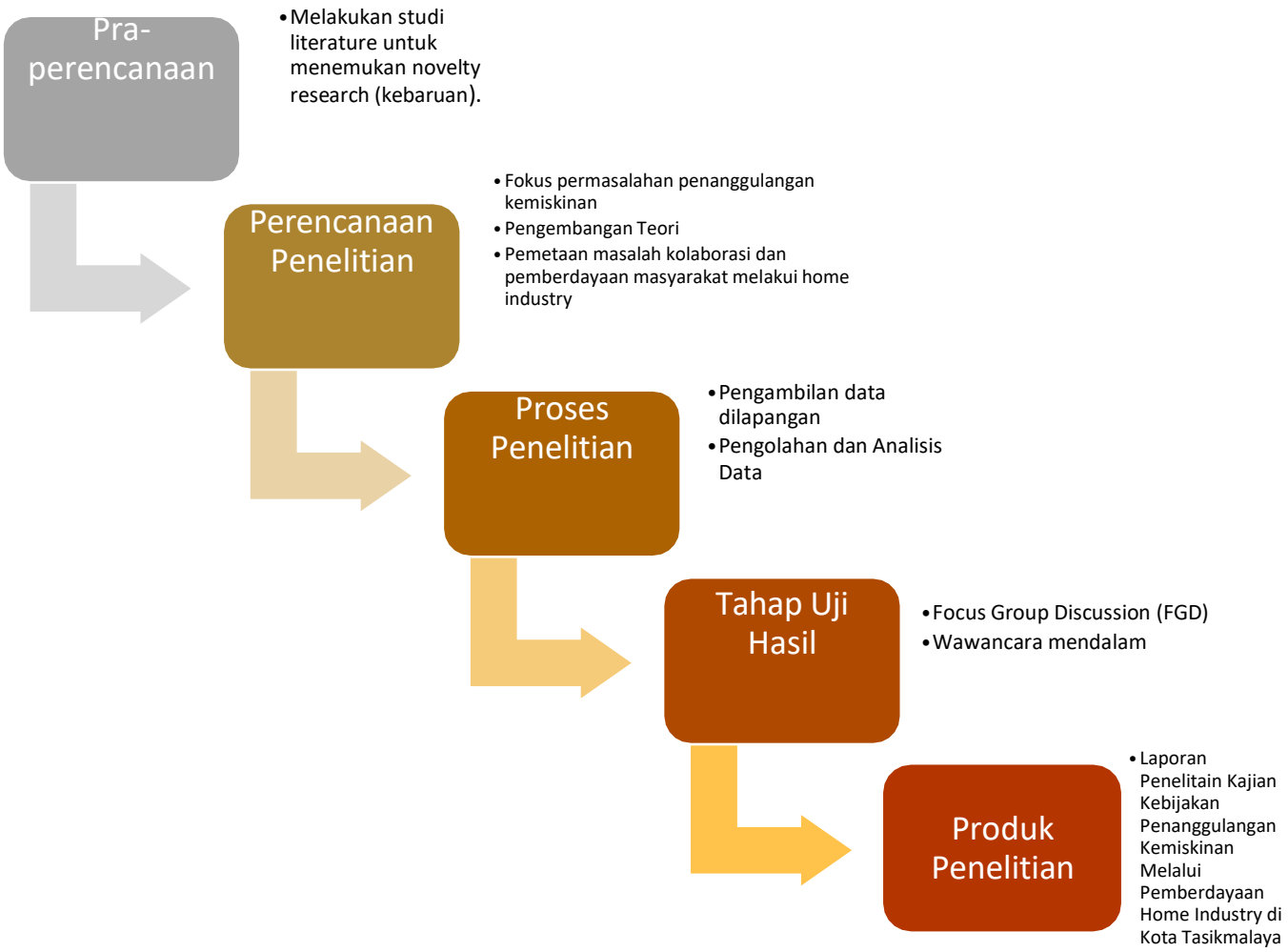

Gambar 2.1 Roadmap Penelitian

(Diolah oleh Penulis, 2023).

Berdasarkan pada gambar diatas, peneliti menggunakan mix method dengan melakukan kegiatan kajian melalui tahapan pra-perencanaan (melakukan studi literatur untuk menemukan novelty/kebaruan penelitian), perencanaan penelitian (fokus masalah, pengembangan teori, dan pemetaan masalah kolaborasi dan pemberdayaan home

industry di Kota Tasikmalaya), proses penelitian (pengambilan data lapangan, dan pengolahan & analisis data), tahap uji hasil (melakukan kegiatan Focus Group Discussion dan wawancara), dan tahapan akhir dengan menghasilkan hasil penelitian dengan orientasi untuk menjelaskan kajian kebijakan pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan melalui home industry di Kota Tasikmalaya.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Prosedur Penelitian

Berdasar pada kebutuhan penelitian, untuk menjawab masalah penelitian, maka kerangka langkah-langkah penelitian ini mengacu pada cara pandang penelitian mix method yaitu menggabungkan penelitian kualitatif dan kuantitatif. Metode penelitian kombinasi ini menggunakan desain penelitian paralel divergen. Desain paralel divergen ini bekerjadengan menggabungkan dua metode (kuantitatif dan kualitatif) dalam waktu bersamaan. Setelah dilakukannya kedua metode tersebut, penulis melakukan perbandingan atau menghubungkan antara kedua metode untuk menghasilkan data yang dapat diinterpretasi oleh penulis.

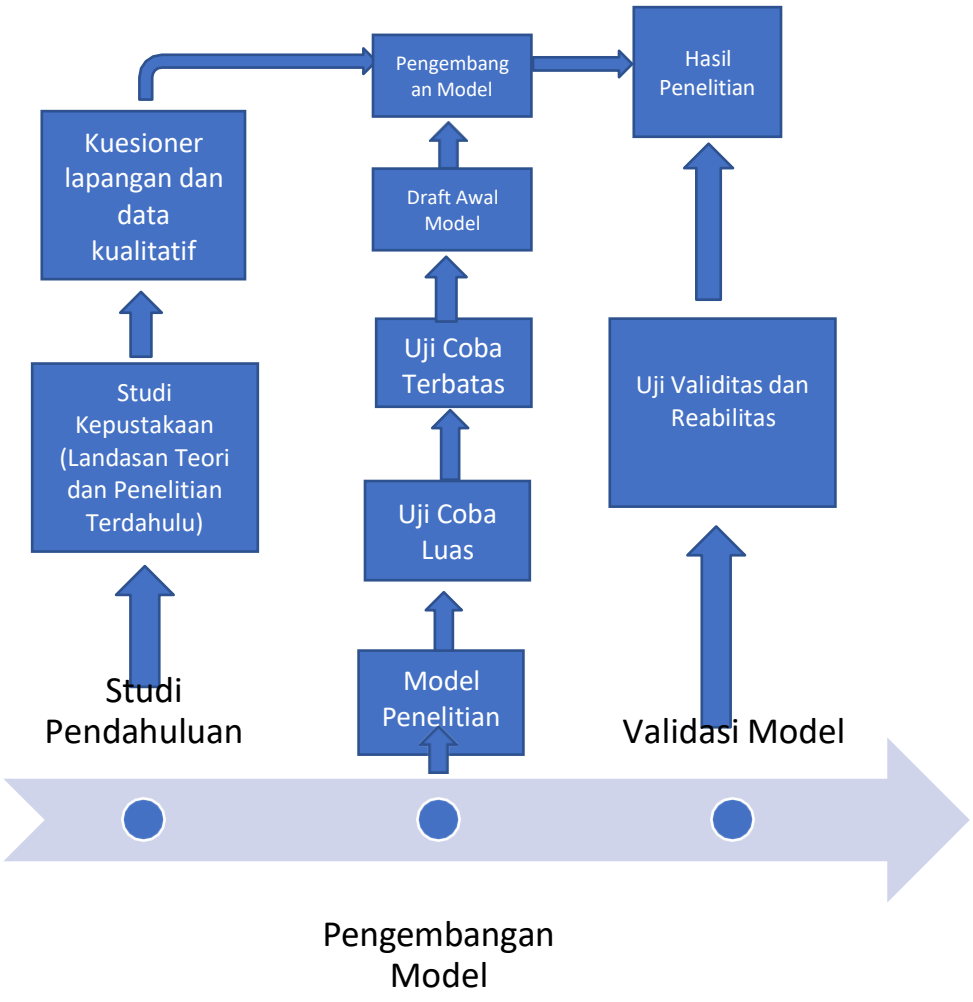

Gambar 3.1 Prosedur Penelitian

3.2 Tahap Studi Pendahuluan

Kegiatan pendahuluan adalah kegiatan pra-penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data-data awal serta menyiapkan kerangka konseptual dan pertanyaan yang diajukan kepada responden dari tema penelitian. Atas dasar hal tersebut, pada tahap studi pendahuluan, peneliti melakukan dua kegiatan utama, yaitu (1) studi literatur, dan (2) survey pendahuluan (kuantitatif dan kualitatif). Studi literatur meliputi kajian kepustakaan yang ditujukan untuk mempelajari landasan-landasan teoritis kolaborasi dan pemberdayaan home industry. Secara umumdikaji konsep teoritis tentang Kebijakan Kolaborasi dalam penanggulangan kemiskinan di Kota Tasikmalaya melalui pemberdayaan home industry. Pada tahap survey pendahuluan, dilakukan observasi dilapangan mengenai Kolaborasi kebijakan dan pemberdayaan masyarakat.

Survey bertujuan untuk mengungkap data awal mengenai kebijakan kolaborasi dan pemberdayaan masyarakat melalui home industry, kesesuaiannya dengan teori kolaborasi dan pemberdayaan, mengkaji model-model yangbiasa digunakan oleh lembaga sejenis serta kemungkinan untuk bisa dikembangkan lebih lanjut.

a) Pengembangan Model

Pada tahap ini dilakukan kegiatan penyusunan draf awal model, kemudian dilakukan uji coba secara terbatas, dan selanjutnya dilakukan uji coba lebih luas. Kedua kegiatan uji coba tersebut dilakukan dalam rangka menghasilkan desain pertanyaan penelitian yang baik. Pada uji terbatas peneliti melakukan penyebaran kuesioner dan wawancara secara mendalam dan observasi evaluasi kegiatan kolaborasi dalam penanggulangan kemiskinan.

b) Pengujian Model

Pengujian model dimaksudkan untuk mengetahui efektivitas model atau desain penelitian. Peneliti melakukannya dengan mix metode berupa peenyebaran kuesioner, wawancara, observasi, maupun dokumentasi. Hasil yang diperoleh kemudian dianalisis sehingga menghasilkan suatu hasil penelitian.

3.3 Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini ialah jumlah industry kecil di Kota Tasikmalaya tahun 2021 berdasarkan data dari Dinas Koperasi, UMKM dan Perindag. Sampel adalah bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2013). Metode yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah metode purposive random sampling. Purposive random sampling adalah metode pengambilan sampel yang disesuaikan dengan kriteria tertentu agar sampel yang terpilih lebih representatif

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Purposive sampling berdasarkan kriteria yaitu responden merupakan pemilik home industry. Secara spesifik survey dilakukan dengan menemui pemilik home industry agar mengetahui sejauh mana kebijakan kolaborasi dan pemberdayaan home industry sudah dilakukan sebagai upaya penanggulangan kemiskinan di Kota Tasikmalaya.

Pengambilan populasi didasarkan pada kategori usaha kecil yang ada di Kota Tasikmalaya sebesar 4.245 usaha kecil. Kemudian peneliti melakukan Kerjasama dengan memetakan berdasarkan jenis usaha. Setiap yang mengisi kuesioner harus memenuhi kriteria sebagai home industry. Kemudian harus pemilik home industry yang mengisi kuesioner tersebut.

Kriteria home industry yang digunakan antara lain:

Pemilik Home industry atau industry rumah tangga memiliki beberapa ciri diantaranya sebagai berikut (Arshad dan Burhanuddin, 2023):

1. Suatu unit usaha yang tidak berbentuk badan hukum.
2. Dilaksanakan oleh seseorang atau beberapa anggota rumah tangga yang

mempunyai tenaga kerja sebanyak empat orang atau kurang.

3. Kegiatan mengubah barang dasar menjadi barang jadi atau setengah jadi atau yang dari nilainya kurang menjadi yang lebih tinggi nilainya dengan tujuan untuk dijual atau ditukar dengan barang lain.
4. Terdapat satu anggota keluarga yang menanggung risiko.
5. Hanya menggunakan satu atau dua rumah sebagai pusat produksi, administrasi, dan pemasaran secara bersamaan.
6. Bila dilihat dari modal usaha dan jumlah tenaga kerja yang diserap lebih sedikit dari perusahaan-perusahaan besar.

Hasil pemilihan sampel dengan menggunakan teknik purposive random sampling. Untuk mengukur besaran sampel yang akan diteliti peneliti mengggunakan rumus Slovin, dimana rumus ini mampu mengukur besaran sampel yang akan diteliti.

$$n = \frac{N}{N.e^2+1}$$

Keterangan : n = Jumlah Sampel
N = Jumlah Populasi
e = Nilai kritis (batas kesalahan) yang diinginkan adalah

Jumlah Populasi (N) *
4245

Toleransi Eror (e) *
0.1

Jumlah Sampel (n)
97.698504028

Berdasarkan metode diatas Peneliti melakukan persebaran sampel sebanyak 98 dengan pembagian proporsi sebagai berikut:

Tabel 3.1
Proporsi Persebaran Sampel

No.	Jenis Industri	Jumlah Industri Tahun 2021		
		Kecil (Unit)	**Dalam Persen (%)**	**Jumlah Sampel**
1	Bordir	1.311	31%	31
2	Kerajinan Mendong	173	4%	4
3	Kerajinan Bambu	74	2%	2
4	Alas Kaki (Sandal, Sepatu, Kelom Geulis)	548	13%	12
5	Kayu Olahan (Meubel)	223	5%	4
6	Batik	41	1%	1
7	Payung Geulis	8	0%	1
8	Makanan Olahan	1.049	25%	24
9	Bahan Bangunan	313	7%	7
10	Pakaian Jadi	327	8%	8
11	Percetakan	54	1%	1
12	Lain-lain	124	3%	3
JUMLAH		**4.245**	100%	98

Tabel 3.2
Karakteristik Sampel

Informan (Berdasarkan Jenis Industri)	Lokasi	Pendidikan	Jumlah Modal Home Industry	Jumlah Pendapatan Home Industry	Pendapatan Karyawan (Dalam Sebulan)	Jumlah Informan
Bordir	1. Bungursari 2. Cibeureum 3. Cihideung 4. Cipedes 5. Indihiang 6. Kawalu 7. Mangkubumi 8. Purbaratu 9. Tamansari 10. Tawang	SD/Sederajat SMP/Sederajat SMA/ Sederajat Diploma S1 S2	<Rp. 200 juta Rp. 200 juta-Rp. 500 juta Rp.500 juta-1 Milyar >Rp. 1 Milyar	<Rp. 200 juta Rp. 200 juta-Rp. 500 juta Rp.500 juta-1 Milyar >Rp. 1 Milyar	>1.000.000 >2.000.000 >2.500.000	31
Kerajinan Mendong						4
Kerajinan Bambu						2
Alas Kaki (Sandal, Sepatu, Kelom Geulis)						12
Kayu Olahan (Meubel)						4
Batik						1
Payung Geulis						1
Makanan Olahan						24
Bahan Bangunan						7
Pakaian Jadi						8
Percetakan						1
Lain-lain						3

Berdasarkan tabel tersebut menunjukkan bahwa sampel dalampenelitian didasarkan pada jenis industry, lokasi penelitian, Pendidikan, modal,pendapatan home industry dan pendapatan karyawan dalam sebulan.

3.3 Operasional Variabel

Operasional variabel merupakan bagian penting dalam melakukan penelitian, secara konseptual operasional variabel merupakan penjabaran dari variabel-variabel penelitian, dimensi, dan indikator yang digunakan untuk mengukur variabel tersebut.

Variable	Dimensi	Indikator	Item
Collaborative Governance Collaborative Governance adalah serangkaian pengaturan dimana satu atau lebih lembaga publik yang melibatkan secara langsung Pemangku kepentingan "non-state" di dalam proses pembuatan kebijakan yang bersifat formal, berorientasi konsensus dan deliberatif yang bertujuan untuk membuat atau mengimplementasikan kebijakan publik atau mengatur program publik (Ansell dan Gash, 2008).	Starting Conditions	Ketidakseimbangan kekuasaan.	1. Program pemberdayaan home industry rutin dilakukan oleh Dinas Koperasi, UMKM dan Perindag Kota Tasikmalaya 2. Terdapat pendamping program pengembangan industry yang ada pada setiap kecamatan
		Insentif untuk berkolaborasi	3. Rutin mengikuti kegiatan asosiasi/perkumpulan untuk mendapatkan informasi tentang peningkatan pendapatan industry 4. Program-program tentang pendampingan home industry tidak hanya berasal dari pemerintah daerah 5. Pemilik home industry mempekerjakan masyarakat miskin sekitar untuk membantu perekonomiannya
		Sejarah Kerjasama	6. Pemilik home industry mendapatkan informasi yang jelas dari pemerintah daerah tentang program pemberdayaan 7. Ada komitmen dari home industry untuk meningkatkan pengetahuan baru setelah mendapatkan

			pelatihan dari pemerintah. 8. Pendamping home industry pada setiap kecamatan rutin mengadakan pertemuan. 9. Tidak ada hambatan dalam menjalin komunikasi dengan pemerintah.
		Peran Pemimpin	10. Terdapat koordinator yang mampu menjembatani kepentingan home industry. 11. Desa/kecamatan sering terlibat dalam pengembangan home industry
	Desain Institusional	Dasar/Aturan/Konsensus dalam kolaborasi	12. Aturan terbaru tentang home industry dan UMKM sudah disosialisasikan.
		Legitimasi	13. Memahami aturan tentang home industry/UMKM dapat mempermudah dalam melakukan kerjasama 14. Home Industry memiliki peran dalam pengentasan kemiskinan.
	Proses Kolaborasi	Dialog tatap muka	15. Home industry selalu berpartisipasi apabila ada tawaran pertemuan rutin dari pemerintah.
		Membangun Kepercayaan	16. Terdapat kegiatan monitoring dari pemerintah untuk mengetahui dampak dari setiap program yang dilakukan
		Komitmen terhadap proses	17. Setiap program pemberdayaan home industry dilakukan pemerintah untuk berkomitmen dalam pengentasan kemiskinan. 18. Terdapat peningkatan skill pegawai setiap tahun setelah program pemberdayaan dilaksanakan.

		Pemahaman bersama	19. Terdapat perubahan perilaku dan etos kerja setelah program pelatihan dilaksanakan oleh pemerintah
		Hasil Antara	20. Pelaku home industry dan pemerintah daerah mendapatkan hasil dari program pendampingan industry.
Pemberdayaan Masyarakat pemberdayaan masyarakat merupakan syarat utama agar dapat membawa masyarakat menuju suatu peningkatan ekonomi	Pemberdayaan Masyarakat	Menciptakan suasana/iklim yang memungkinkan berkembangnya potensi masyarakat.	21. Program pemberdayaan home industry sangat beragam. 22. Program pemberdayaan home industry telah dilakukan untuk menjangkau konsumen berbasis digital
		Peningkatan kemampuan dan pengetahuan.	23. Program pemberdayaan Home Industri telah dilakukan bersama pemerintah salah satunya adalah peningkatan kemampuan dan keterampilan. 24. Program pemberdayaan mampu mendorong inovasi dari pelaku home industry
		Melindungi masyarakat dari kelompok lemah.	25. Perlu ada kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat untuk pengentasan kemiskinan .
		Menyokong masyarakat agar tidak terjatuh kedalam keadaan dan posisi yang semakin lemah	26. Pemerintah membantu dalam mengembangkan manajemen usaha. 27. Pemerintah membantu dalam mempertahankan keberadaan home

			industry pasca pandemic covid19.
		memelihara kondisi yang kondusif	28. Tersedianya akses terhadap modal untuk menambah jumlah produksi. 29. Terjadi peningkatan jumlah pekerja setiap tahun.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Pemaparan hasil penelitian ini menyangkut beberapa bagian yakni memaparkan hasil uji validitas dan reliabilitas, memaparkan data responden, serta hasil survey yang terbagi dalam dua variabel yakni Collaborative Governance dengan dimensi Starting Conditions, Kepemimpinan Dalam berkolaborasi, Desain Institusional, Proses Kolaborasi dan Hasil. Kemudian variable pemberdayaan masyarakat dengan dimensi Pemungkinan, Penguatan, perlindungan, Penyokongan dan Pemeliharaan.

4.1.1 Uji Validitas dan Reliabilitas

Bagian ini merupakan aspek penting dalam megukur valid dan reliabel nya instrumen penelitian. Secara konseptual, uji validitas adalah pengujian yang dilakukan guna untuk mengetahui seberapa cermat suatu instrumen dalam mengukur apa yang ingin diukur. Sedangkan, uji reliabilitas adalah untuk menguji konsisten alat ukur, apakah hasilnya tetap konsisten jika pengukuran diulang. Kedua uji tersebut digunakan dalam penelitian ini dengan hasil sebagai berikut.

Tabel 4.1 Uji Validitas

Berdasarkan perhitungan korelasi didapat nilai koefisien korelasi setiap item yang menunjukkan lebih dari 0.05 dan lebih tinggi dari r tabel 0.470. Hasil tersebut menandakan bahwa seluruh instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini valid. Uji validitas digunakan dengan menggunakan uji Pearson Correlation. Dengan demikian atribut dapat dinyatakan "valid".

No Soal	r hitung	r tabel	Ket.
1	0.754	0.470	Valid
2	0.815	0.470	Valid
3	0.657	0.470	Valid
4	0.656	0.470	Valid
5	0.734	0.470	Valid
6	0.842	0.470	Valid
7	0.654	0.470	Valid
8	0.681	0.470	Valid
9	0.713	0.470	Valid
10	0.782	0.470	Valid
11	0.497	0.470	Valid
12	0.781	0.470	Valid
13	0.765	0.470	Valid
14	0.784	0.470	Valid
15	0.673	0.470	Valid
16	0.654	0.470	Valid

17	0.742	0.470	Valid
18	0.611	0.470	Valid
19	0.568	0.470	Valid
20	0.765	0.470	Valid
21	0.675	0.470	Valid
22	0.645	0.470	Valid
23	0.729	0.470	Valid
24	0.654	0.470	Valid
25	0.754	0.470	Valid
26	0.815	0.470	Valid
27	0.543	0.470	Valid
28	0.614	0.470	Valid
29	0.711	0.470	Valid

Berdasarkan perhitungan korelasi didapat nilai koefisien korelasi setiap item yang menunjukkan lebih dari 0.05 dan lebih tinggi dari r tabel 0.470. Hasil tersebut menandakan bahwa seluruh instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini valid.

Tabel 4.2 Uji Reliabilitas

Cronbach's Alpha	N of Items
.817	29

Hasil uji reliabilitas diatas Cornbach Alpha mencapai 0,817 yang mana nilai tersebut sudah menunjukkan hasil yang "reliable". Sehingga berdasarkan hasil uji validitas dan reliabilitas ini menunjukkan bahwa instrumen dapat diterima dan dapat digunakan.

Tabel 4.3 Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	98	100.0
	Excluded[a]	0	.0
	Total	98	100.0

Tabel case processing summary menunjukkan total kasus yangdiujikan dan banyaknya nilai kasus yang valid. Pada tabel Case Processing Summary dapat dilihat baris Cases Valid menyatakan bahwa jumlah responden ada 98 dan persentase menunjukkan 100%, hal ini menandakan bahwa 98 responden tersebut valid dan tidak adaresponden yang masuk ke kategori Exculded.

4.1.2 Data Responden

Penelitian ini berfokus pada home industry di Kota Tasikmalaya berdasarkan kategori jenis industry. Data responden ditampilkan diantaranya

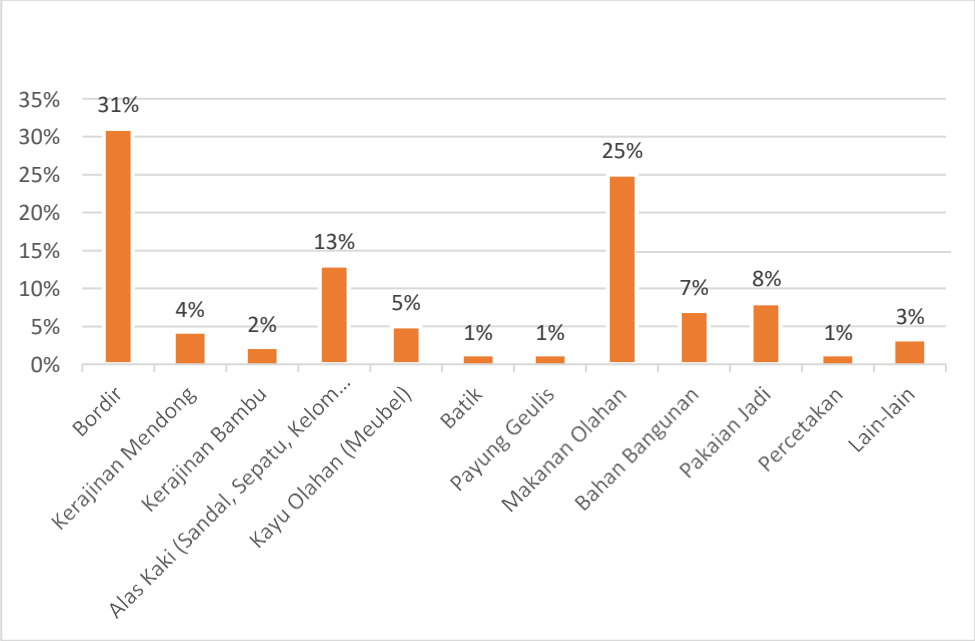

Gambar 1. Jenis Industry Responden

Data tersebut menjelaskan bahwa responden dalam penelitian inididominasi oleh industry border sebanyak 30 %, makanan olahan sebanyak 25 %, alas kaki sebanyak 13 %, pakaian jadi sebanyak 8 %, bahan bangunan sebanyak 7 %, kayu olahan sebanyak 5 %, kerajinan mending sebanyak 4 %, lain-lain 3 %, kerajinan kayu bambu sebanyak 2 %, kemudian batik, payung geulis dan percetakan sebanyak 1 %. Penggunaan jumlah responden tersebut ditujukkan untuk menjadikan data yang lebih representatif dan disesuaikan dengan persebaran karakteristik home industry.

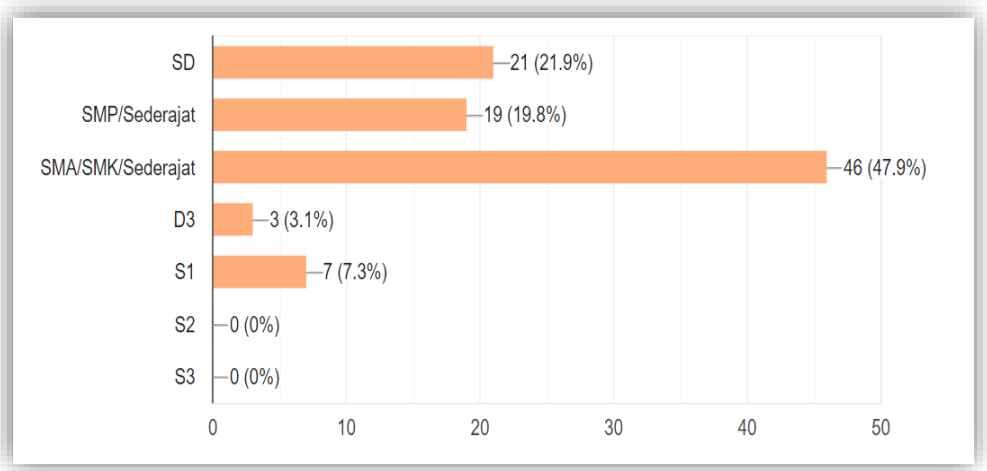

Gambar 2. Pendidikan Responden

Tingkat pendidikan responden secara mayoritas diisi oleh tingkat pendidikan SD/ Sederjat, SMP/ Sederajat, dan SMA/ Sederajat. Data pendidikan tersebut menandakan bahwa masyarakat yang menjadi responden bukan berada pada kategori masyarakat dengan pendidikan tinggi.

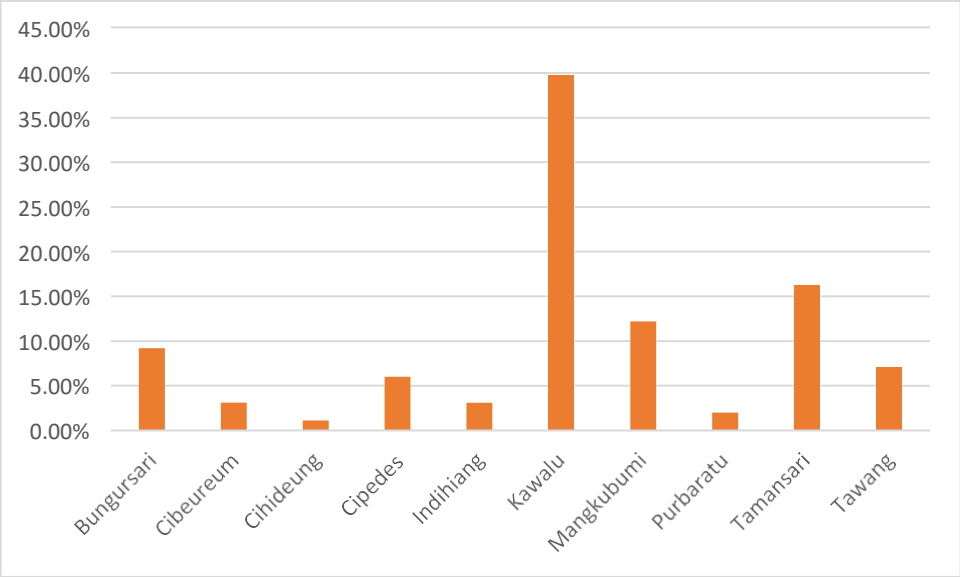

Gambar 3. Lokasi Penelitian

Lokasi responden dalam penelitian ini melibatkan seluruh kecamatan di Kota Tasikmalaya, hal ini merupakan upaya untuk dapat menyebarkan data secara menyeluruh pada setiap lokasi di Kota Tasikmalaya, sehinggaseluruh responden pada tiap kecamatan di Kota Tasikmalaya dapat terwakili. Namun peneliti memang mengutamakan beberapa wilayah kecamatan yang menurut data menjadi sentra Industri Kecil dan Menengah (IKM) di Kota Tasikmalaya, misalnya Kawalu, Mangkubumi dan Tamansari.

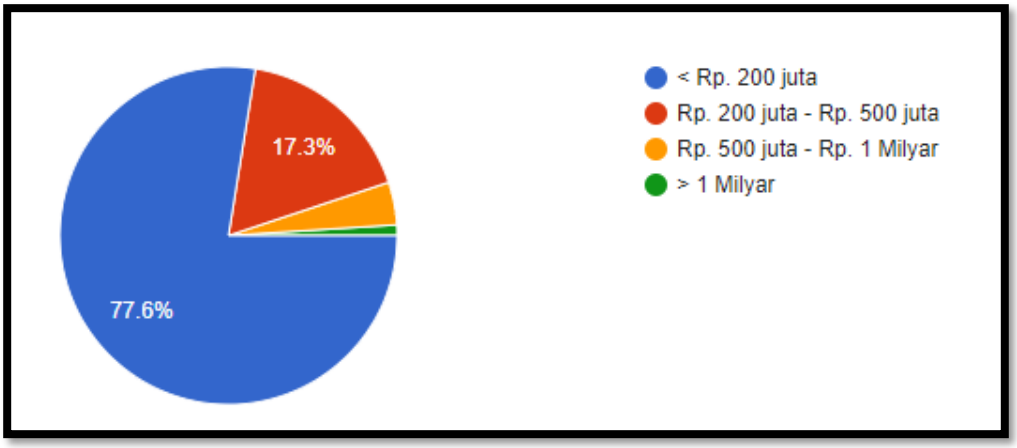

Gambar 4. Jumlah modal home industry

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa mayoritas modal yang digunakan dalam membangun home industry di Kota Tasikmalaya sebanyak 77.6 % memiliki modal sebesar <200 juta, 17,3 % memiliki modal sebesar Rp. 200 juta-Rp. 500 juta, 4,1 % memiliki modal Rp. 500 juta-Rp. 1 Milyar dan sebanyak 1 % sebanyak >1 Milyar. Hal ini menunjukkan bahwa kuesioner yang tersebut sangat berfokus pada pelaku home industry yang memiliki modal awal <Rp. 200 Juta.

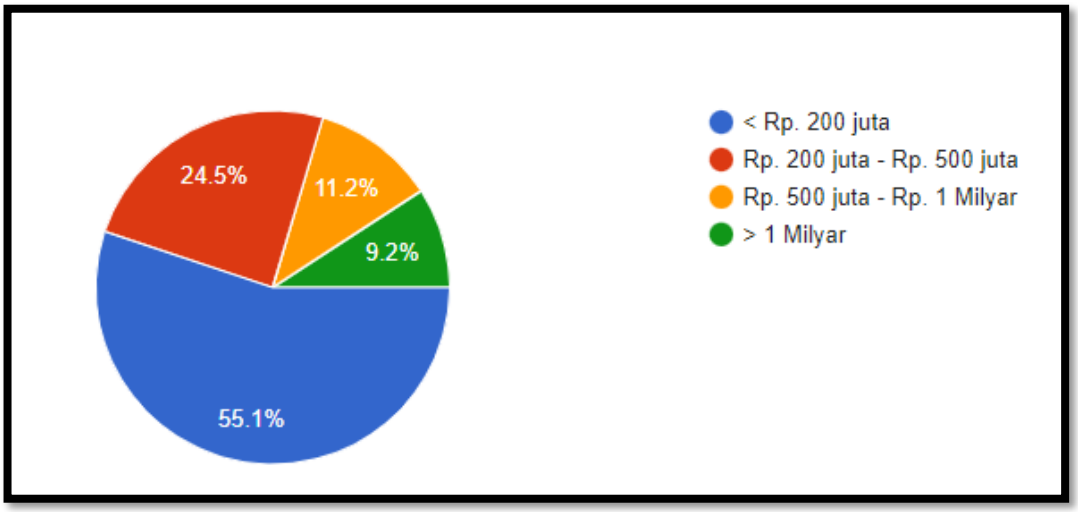

Gambar 5. Jumlah pendapatan home industry per tahun

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa mayoritas pendapatan dari home industry meningkat pada yang masuk dalam kategori penghasilan per tahun Rp. 200 juta-Rp. 500 juta, Rp.500 juta-Rp. 1 Milyar jika dibandingkan dengan modal awal.

4.1.2 Kolaborasi Pemerintah dalam Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Home Industry.

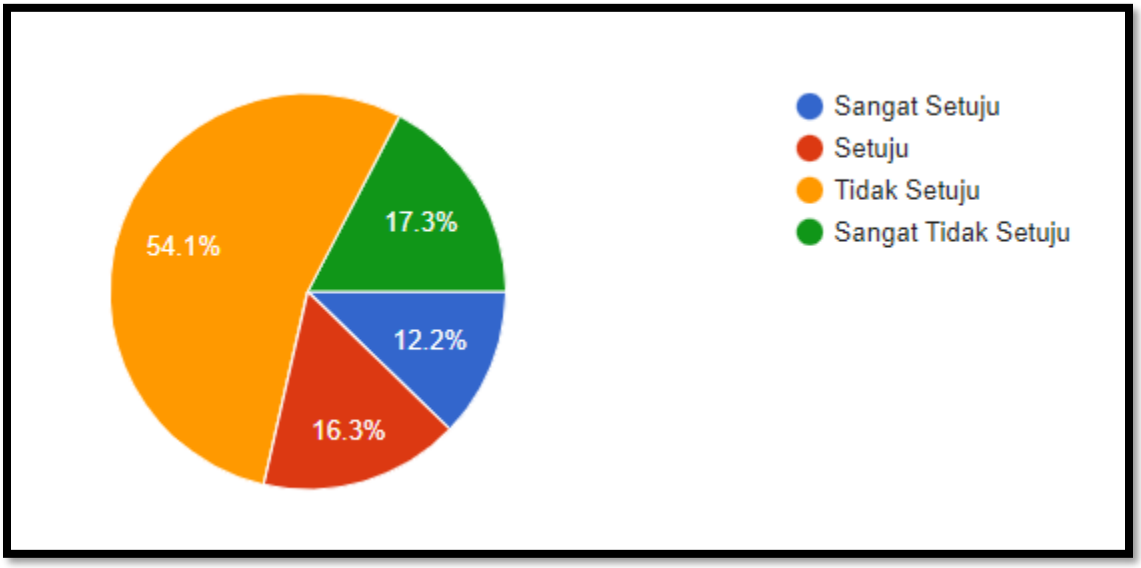

Gambar 6 Program pemberdayaan home industry rutin dilakukan oleh Dinas Koperasi, UMKM dan Perindag Kota Tasikmalaya

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa mayoritas pelaku home industry tidak setuju bahwa pemberdayaan home industry rutin dilakukan terutama oleh Dinas Koperasi, UMKM, Perindag Kota Tasikmalaya. Data ini menunjukkan bagian dari kondisi awal proses kolaborasi. Pendapat dari pelaku industry ini perlu menjadi bahan evaluasi dalam melihat proses kolaborasi yang belum dibangun dengan optimal. Namun wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti misalnya dengan pendamping UMKM di Kecamatan Cipedes menyebutkan bahwa sebenarnya bentuk kerjasama sudah dilakukan terutama dalam pemberian pelatihan, namun memang masih terdapat beberapa kendala, misalnya masih banyak pelaku UMKM yang belum optimal menggunakan teknologi atau umur yang sudah tidak produktif. Hal ini menyebabkan pelatihan yang diberikan tidak mampu memberikan dampak yang signifikan pada kemajuan home industry.

Informasi lain pada saat Focus Group Discussion bersama Dinas penyelenggaraan layanan industry, sosial maupun tenaga kerja menyebutkan bahwa selama ini program-

program penanggulangan kemiskinan sudah dilaksanakan baik berupa bantuan langsung atau pelatihan. Namun, pemberian bantuan yang dilakukan oleh pemerintah seharusnya bukan menjadi satu-satunya solusi/harapan masyarakat dengan mengenyampingkan kegiatan-kegiatan pemberdayaan yang focus utamanya adalah penyediaan sumber daya manusia yang mandiri. Harapan dari SKPD antara lain memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk meningkatkan keterampilan terutama sebagai upaya mengatasi pengangguran.

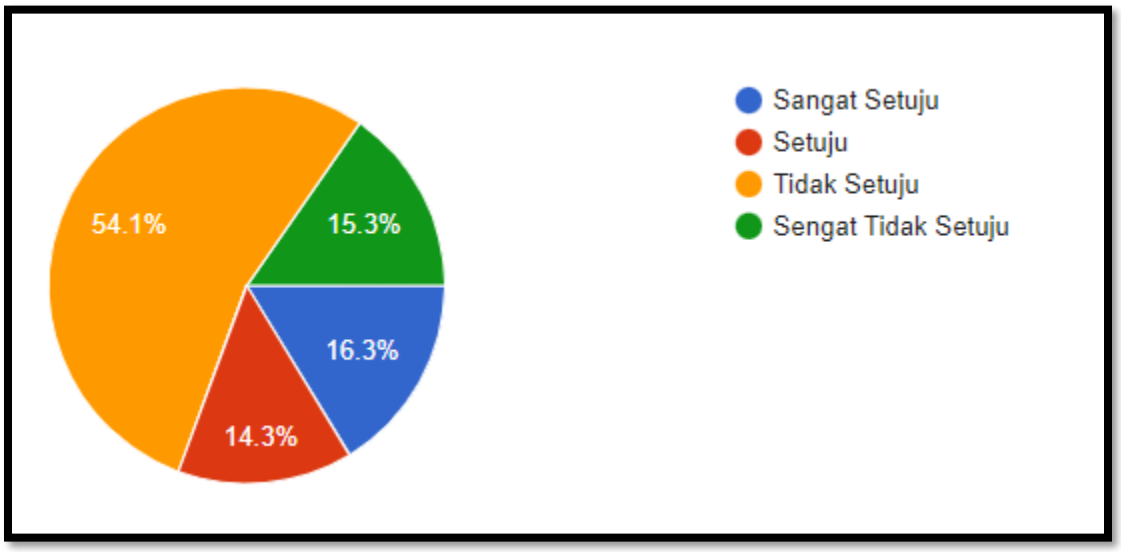

Gambar 7 Terdapat pendamping program pengembangan industry yang ada pada setiap kecamatan

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa keberadaan pendamping home industry masih banyak belum diketahui oleh pelaku home industry. Berdasarkan wawancara dan data dari Dinas Koperasi, UMKM dan Perindag Kota Tasikmalaya menyatakan bahwa banyak program kegiatan home industry dijalankan oleh pendamping industry yang ada pada setiap kecamatan. Hampir semua jawaban dari pendamping kecamatan adalah telah ada pendampingan seperti pelatihan dan pembinaan terhadap pelaku home

industry. Data diatas menunjukkan bahwa perlu monitoring dan evaluasi untuk memaksimalkan peran dari pendamping home industry dan inisiatif aktifdari pelaku home industry dalam pengembangan program.

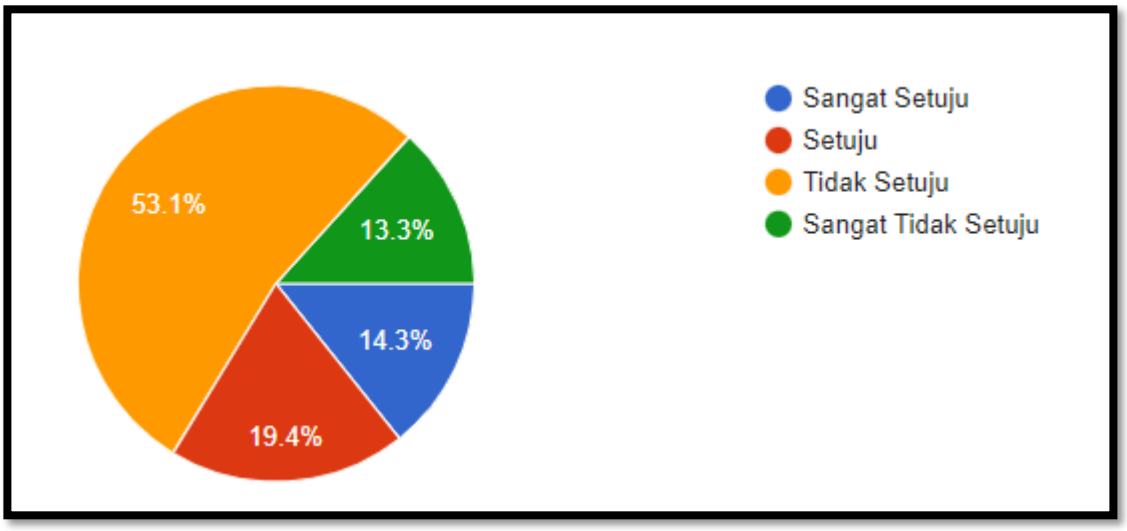

Gambar 8. Rutin mengikuti kegiatan asosiasi/perkumpulan untuk mendapatkan informasi tentang peningkatan pendapatan industry

Data diatas menunjukkan bahwa mayoritas pelaku home industry tidak rutin mengikuti kegiatan asosiasi/perkumpulan dalam mengakses informasi dan peningkatan pendapatan industry. Berdasarkan hasil wawancara dengan dinas Koperasi, UMKM dan Perindag menyebutkan bahwa sector perindustrian harus memberikan perhatian pada kualitas produk dan ketersediaan bahan baku demi keberlanjutan industry. Pola pembinaan yang dilakukan oleh Dinas sebaiknya memiliki kurikulum atau basis penilaian yang bertujuan untuk pengembangan kegiatan usaha. Pola ini dapat terimplementasi dengan cepat apabila ada koordinasi dan komunikasi dengan asosiasi atau perkumpulan pelaku home industry sesuai dengan jenis industry.

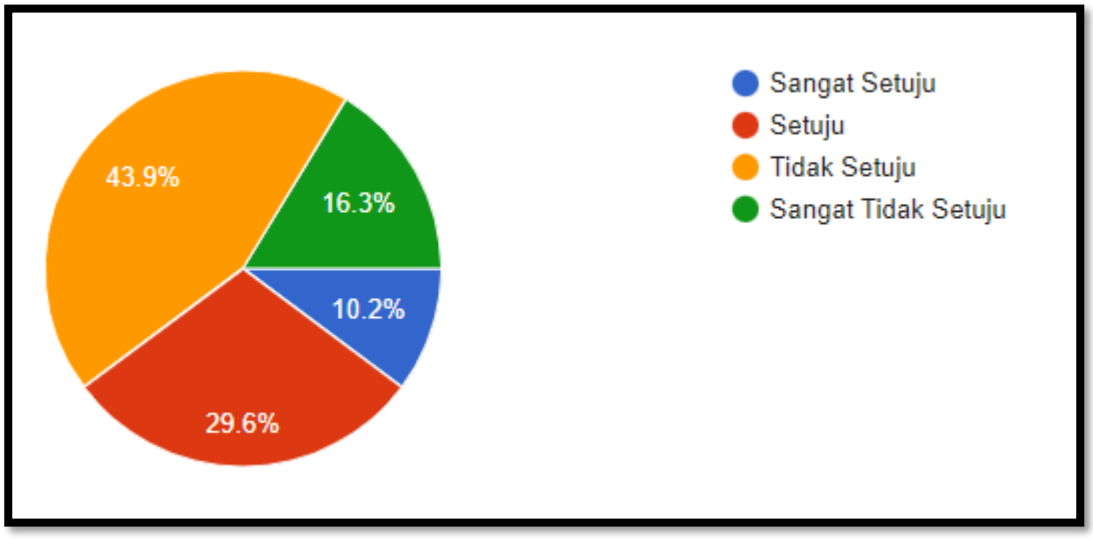

Gambar 9. Program-program tentang pendampingan home industry tidak hanya berasal dari pemerintah daerah

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa 39,8 % pelaku industry sudah mulai mengikuti pendampingan home industry yang tidak hanya dilaksanakan oleh pemerintah. Sementara 60 % masyarakat masih bergantung pada program-program dari pemerintah. Oleh karena itu, angka 39,8 % harus terus ditingkatkan untuk memastikan bahwa program pemberdayaan home industry turun berperan aktif dari kelompok swasta/privat.

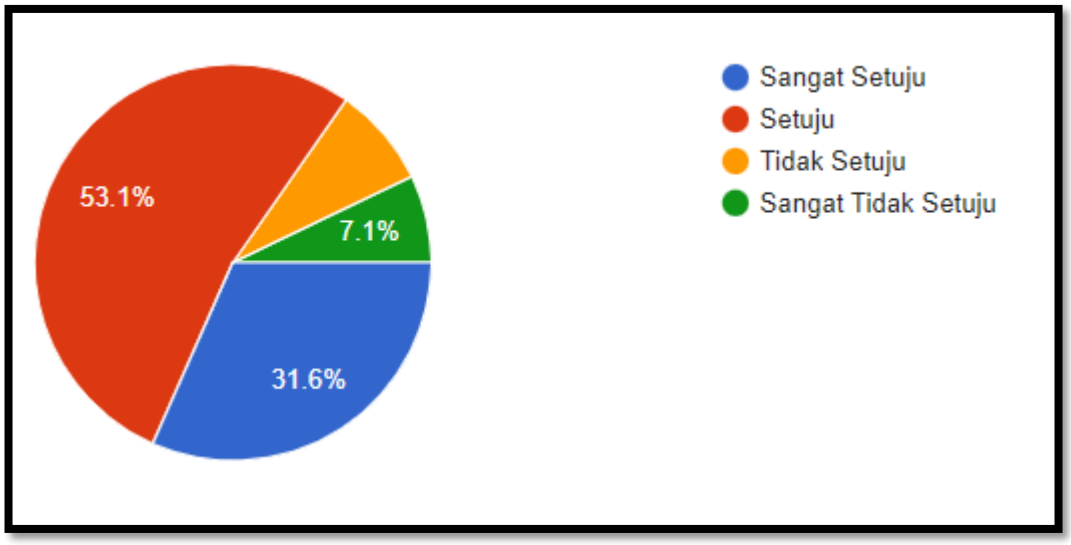

Gambar 10 Pemilik home industry mempekerjakan masyarakat miskin sekitar untuk membantu perekonomiannya

Berdasarkan data diatas dapat dijelaskan bahwa pelaku home industry telah memprioritas pekerja dari kelompok masyarakat miskin sebagai upaya membantu perekonomian masyarakat sekitar. Sehingga pemberdayaan yang efektif dan kolaborasi yang dilakukan akan membantu dalam proses penanggulangan kemiskinan di Kota Tasikmalaya. Hal ini diakrenakan sudah ada komitmen yang baik dari para pelaku home industry.

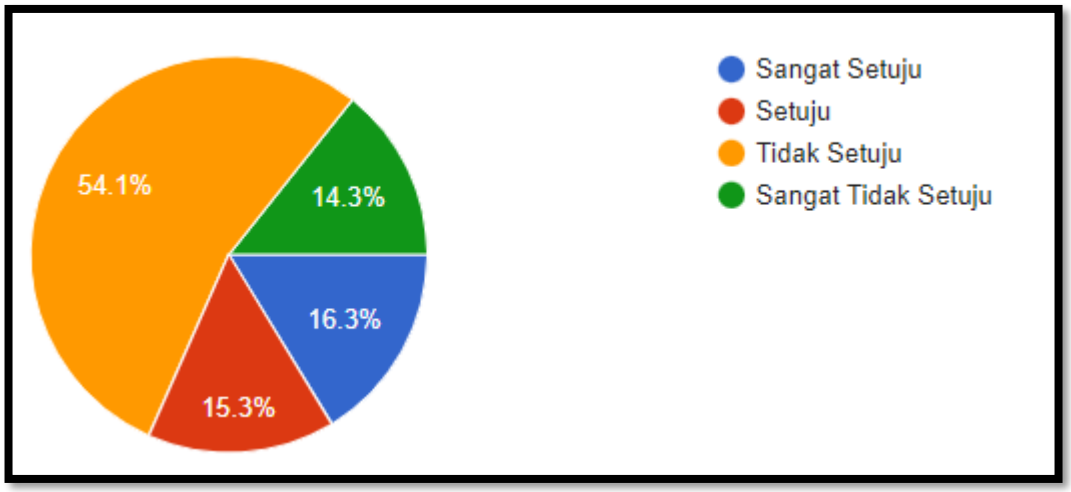

Gambar 11 Pemilik home industry mendapatkan informasi yang jelas dari pemerintah daerah tentang program pemberdayaan.

Berdasarkan data diatas mayoritas pelaku home industry tidak setuju bahwa informasi mengenai pemberdayaan masyarakat sudah jelas yang disampaikan oleh pemerintah daerah. Keterbukaan informasi dan pelibatan masyarakat dapat menjadi solusi dalam upaya penguatan pemberdayaan masyarakat.Berdasarkan wawancara dengan pendamping UMKM Kecamatan Kawalu menyatakan bahwa strategi adanya penyuluh bisa dimaksimalkan dalam pemberian informasi mengenai program-program pemberdayaan masyarakat.

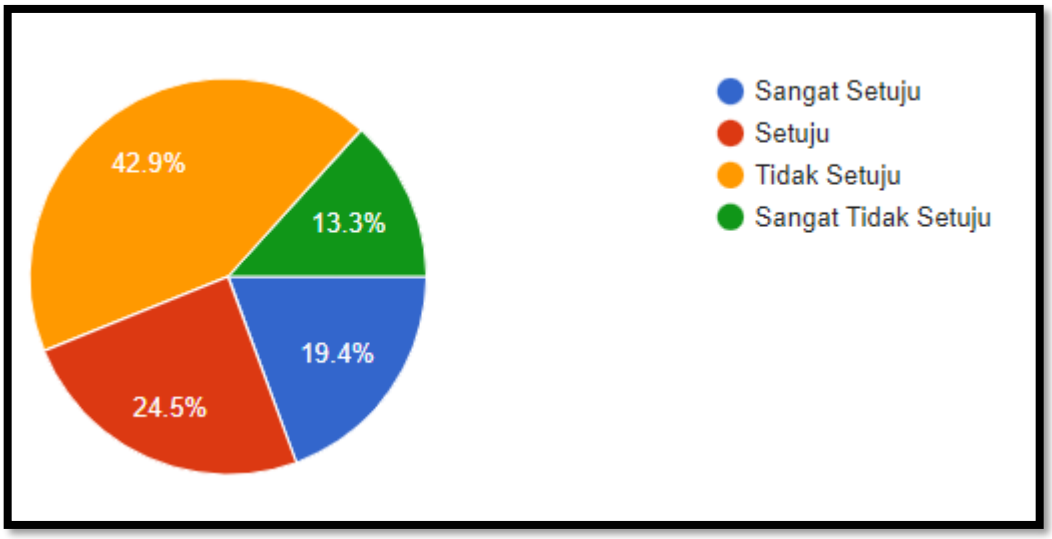

Gambar 12 Ada komitmen dari home industry untuk meningkatkan pengetahuan baru setelah mendapatkan pelatihan dari pemerintah

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa belum ada komitmen dari para pelaku home industry untuk meningkatkan kompetensi/keterampilan pasca pelatihan-pelatihan yang telah dilakukan oleh pemerintah. Hal ini sebagai salah satu masalah penting karena banyak pelatihan yang sudah dilaksanakan namun tidak efektif membangun kemandirian bagi para pelaku home industry. Program Penanggulangan Kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat terutama bagi kelompok industry juga harus sejalan dengan komitmen pelaku home industry untuk terlibat langsung dalam proses kegiatan.

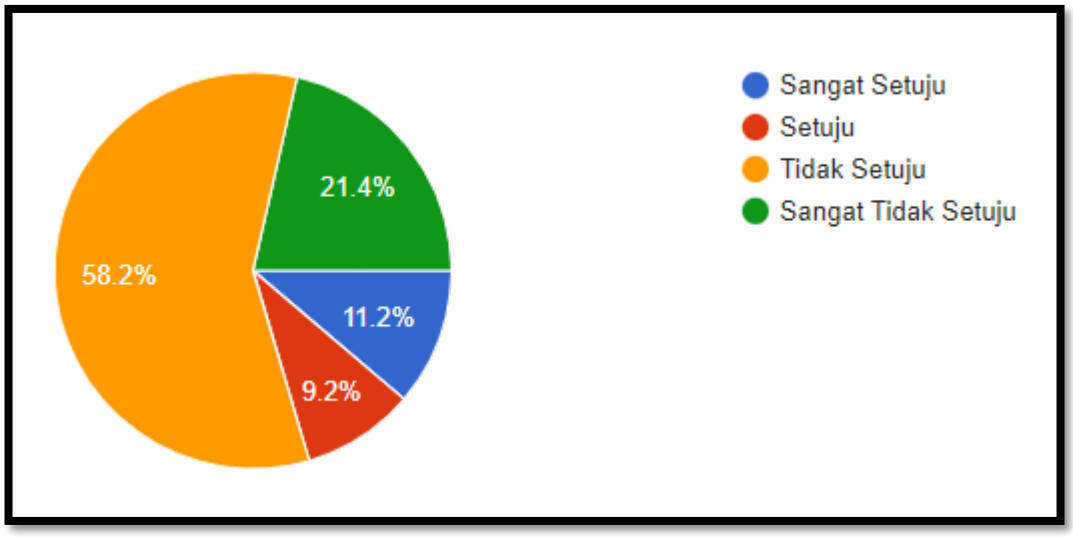

Gambar 13 Pendamping home industry pada setiap kecamatan rutin mengadakan pertemuan.

Berdasarkan data diatas bahwa pelaku industry mayoritas tidak setuju bahwa pendamping home industry mengadakan pertemuan rutin pada setiap kecamatan. Temuan ini bisa saja terjadi karena wawancara denganpendamping industry dikatakan bahwa kebanyakan pertemuan dilakukan dengan pendampingan jemput bola atau secara langsung menemui pelaku industry. Sementara pelaku industry cukup banyak yang ada di Kota Tasikmalaya.

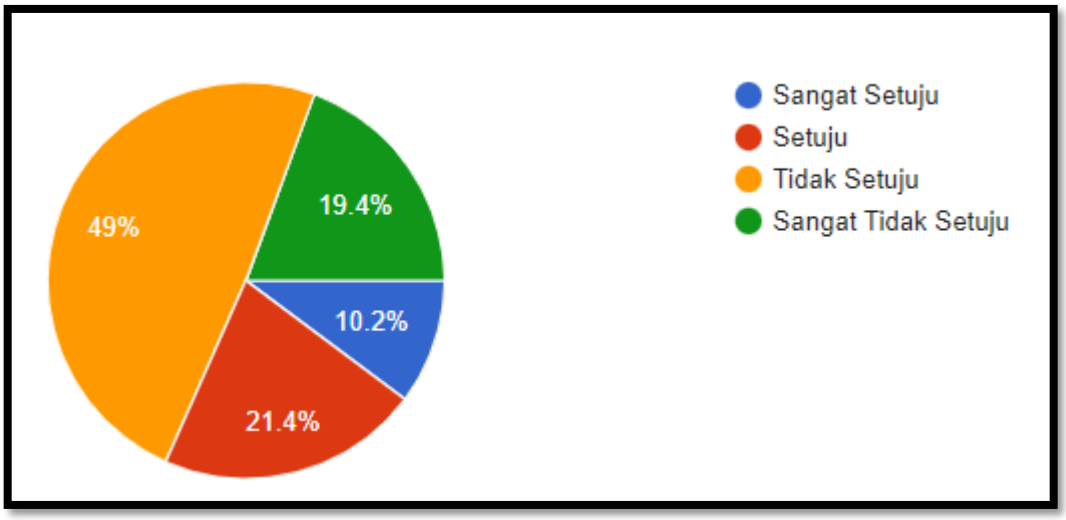

Gambar 14. Tidak ada hambatan dalam menjalin komunikasi dengan pemerintah

Menurut data diatas bahwa masih terdapat hambatan dalam menjalin komunikasi dengan pemerintah. Oleh karena itu, perlu peningkatan komunikasi dan kolaborasi dengan pelaku industry dalam peningkatan pemberdayaan masyarakat.

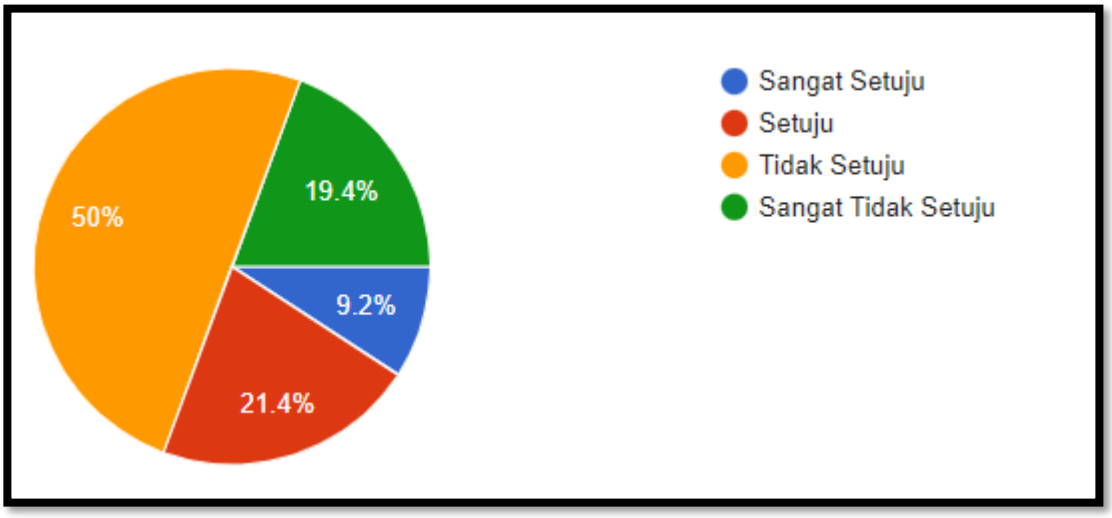

Gambar 15. Terdapat koordinator yang mampu menjembatani kepentingan home industry.

Berdasarkan hasil data diatas bahwa pelaku industry mayoritas menjawab belum ada koordinator yang menjembatani kepentingan home industry. Namun demikian, berbagai pendamping yang sudah ada dilapangan perlu dibantu dengan jaringan komunikasi asosiasi agar jumlah home industry yang tersebar bisa diakomodasi kepentingannya dengan baik.

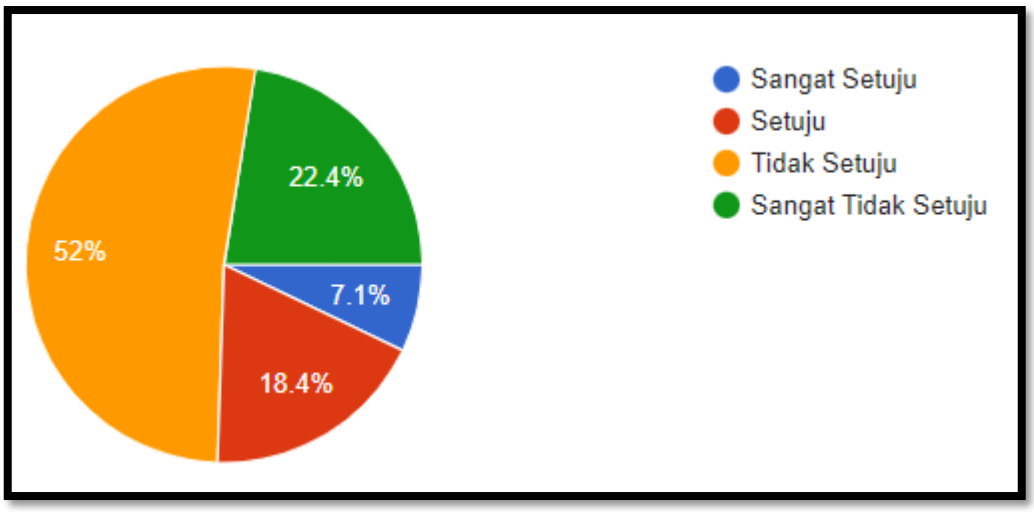

Gambar 16 Desa/kecamatan sering terlibat dalam pengembangan home industry

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa pelaku industry mengganggap belum ada keterlibatan dari kecamatan/desa bagi pengembangan home industry yang signifikan. Keterlibatan dalam pengembangan industry

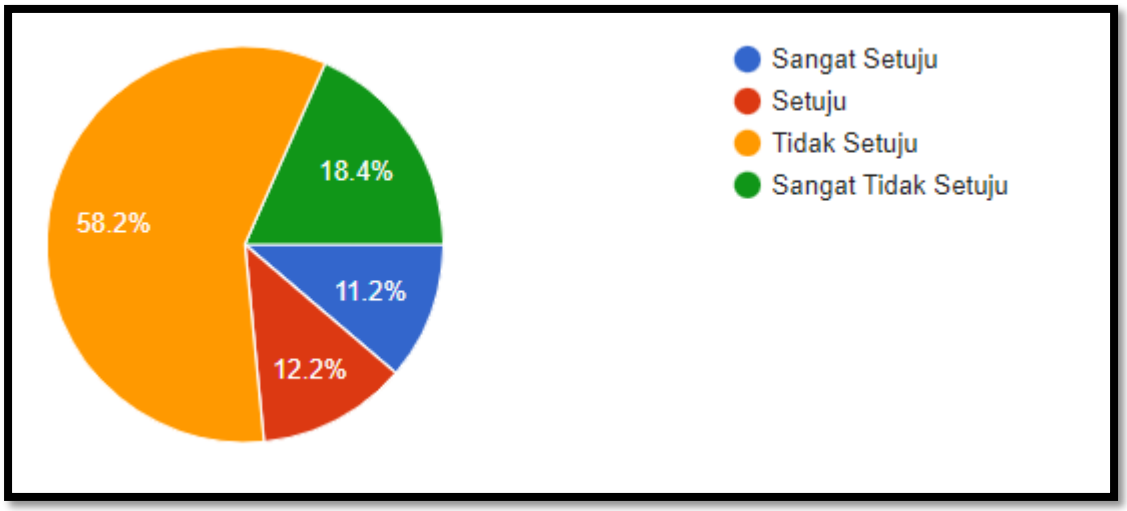

Gambar 17 Aturan terbaru tentang home industry dan UMKM sudah disosialisasikan.

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa aturan mengenai home industry dan UMKM belum disosialisasikan. Sebagai dampak dari cipta kerja aturan baru juga berndampak pada pelaku home industry. Sehingga perlu keterlibatan pendamping dan pemerintah kecamatan atau desa untuk mensosialisasikan PP Nomor 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang merupakan turunan dari aturan Undang-Undang Cipta Kerja, salah satu tujuannya yakni penciptaan lapangan kerja melalui kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan Koperasi dan UMKM. Hal ini merupakan upaya pemerintah untuk memperkuat kemudahan berusaha koperasi dan UMKM, sebagaimana diatur dalam UU Cipta Kerja. Di antaranya melalui penerbitan nomor induk berusaha (NIB) yang berlaku untuk semua kegiatan usaha, termasuk izin usaha, izin edar, Standar Nasional Indonesia (SNI) dan sertifikat produk halal.

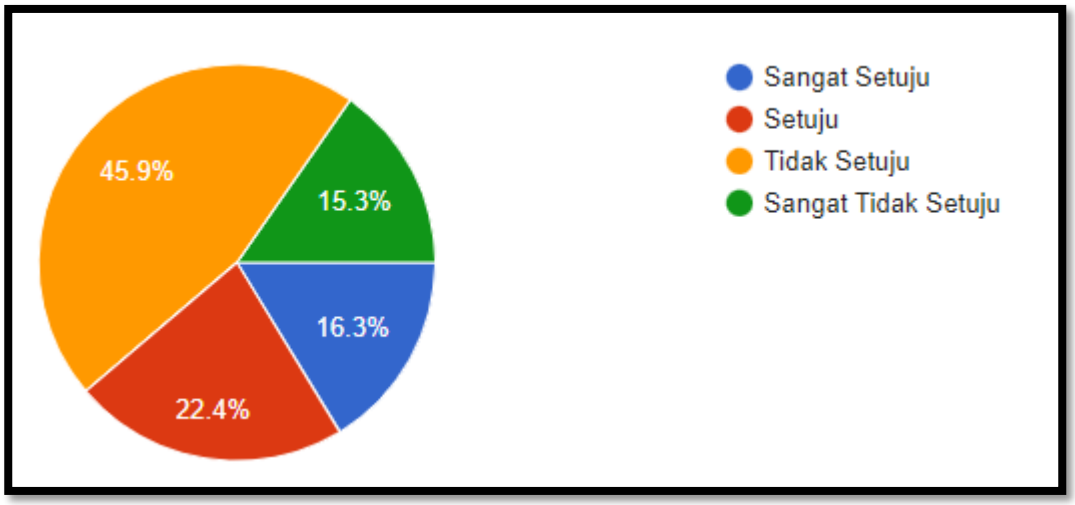

Gambar 18. Memahami aturan tentang home industry/UMKM dapat mempermudah dalam melakukan kerjasama

Berdasarkan hasil data diatas menyebutkan bahwa masih banyak masyarakat yang belum beranggapan bahwa aturan tentang home industry atau UMKM dapat mempermudah dalam melakukan kerjasama. Ketidaktahuanini bisa jadi karena banyak masyarakat yang belum mendapatkan sosialiasi tentang aturan tersebut. Harapannya, jika home industry dapat memahami aturan dasar dalam pengelolaan industry maka akan memberikan peluang pada penanggulangan kemiskinan di Kota Tasikmalaya. Bahkan, pelaku home industry dapat meningkatkan pendapatan setiap tahunnya.

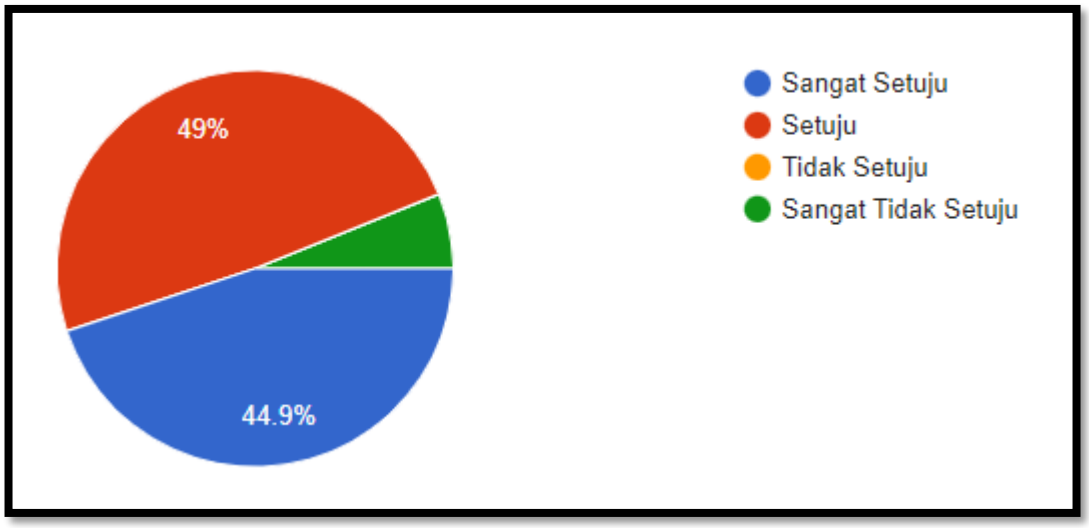

Gambar 19. Home Industry memiliki peran dalam pengentasan kemiskinan.

Berdasarkan data diatas, menunjukkan bahwa pelaku home industry mayoritas merasa terlibat dalam upaya pengentasan kemiskinan. Dalam teori kolaborasi, hal ini masuk pada indicator legitimasi, dimana pelaku home industry dapat memahi perannya terutama pada pengentasan kemiskinan. Semakin banyak masyarakat yang bekerja pada sektor home industry maka semakin berpeluang pada penurunan angka kemiskinan di Kota Tasikmalaya.

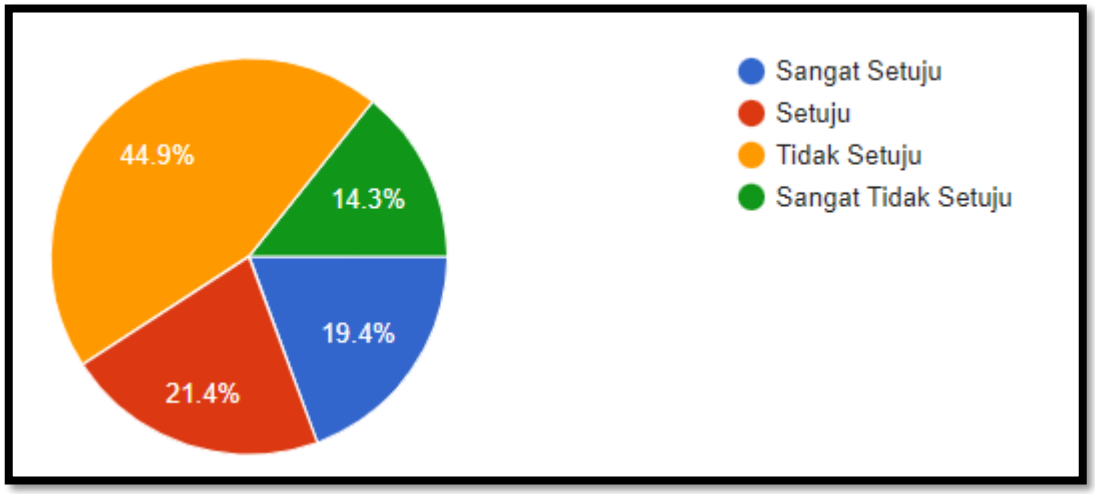

Gambar 20. Home industry selalu berpartisipasi apabila ada tawaran pertemuan rutin dari pemerintah

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa komitmen untuk berkolaborasi masih menjadi tantangan serius dalam sektor industry di Kota Tasikmalaya. Terdapat beberapa harapan dalam perbaikan home industry di Kota Tasikmalaya. Namun disisi lain, tawaran pertemuan rutin masih banyak yang belum ingin berpartisipasi. Pemerintah dapat memberikan strategi dengan pemberian program-program inovatif pada setiap agenda pertemuan yang dijalankan dengan pelaku home industry. Melalui strategi tersebut diharapkan dapat memberikan ketertarikan pelaku home industry dalam melakukan kerjasama.

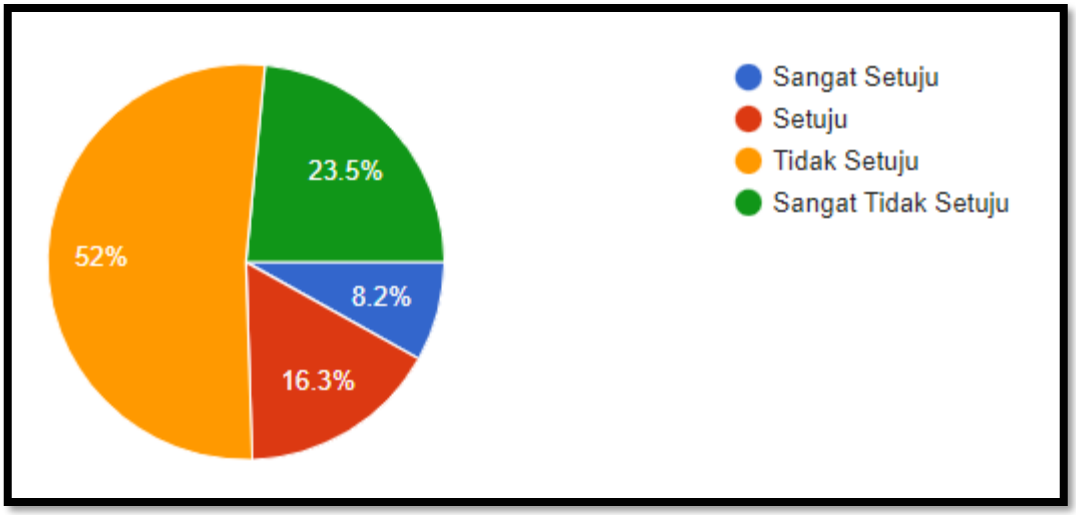

Gambar 21. Terdapat kegiatan monitoring dari pemerintah untuk mengetahui dampak dari setiap program yang dilakukan

Berdasarkan data diatas menyatakan bahwa banyak yang tidak setuju pemerintah telah melakukan kegiatan monitoring pada setiap program yang

dijalankan. Berdasarkan wawancara pada dinas terkait menyebutkan bahwa banyak program pelatihan yang sudah dilakukan, namun keberlanjutannya/kemandirian masyarakat pasca kegiatan selesai tidak menunjukkan hasil yang signifikan. Oleh karena itu, perlu membuat strategic vision dalam mendongkrak angka penurunan kemiskinan di Kota Tasikmalaya salah satunya melalui inovasi pemberdayaan masyarakat berbasis home industry.

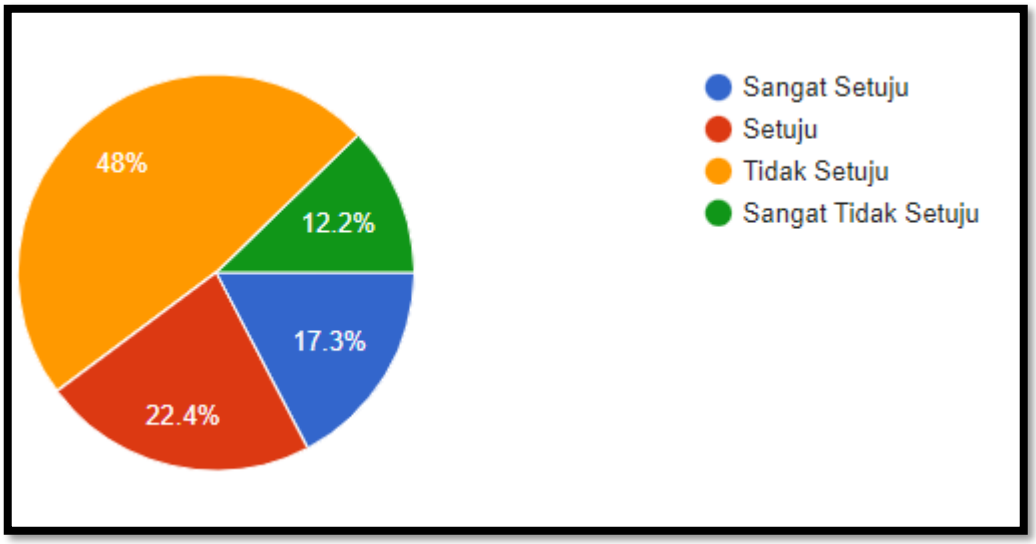

Gambar 22. Setiap program pemberdayaan home industry dilakukan pemerintah untuk berkomitmen dalam pengentasan kemiskinan.

Berdasarkan data diatas, mayoritas pelaku industry beranggapan bahwa belum ada komitmen dalam pengentasan kemiskinan. Hal ini disebabkan oleh salah satu kegiatan monitoring dan evaluasi yang belum dirasakan dampaknya oleh pelaku industry.

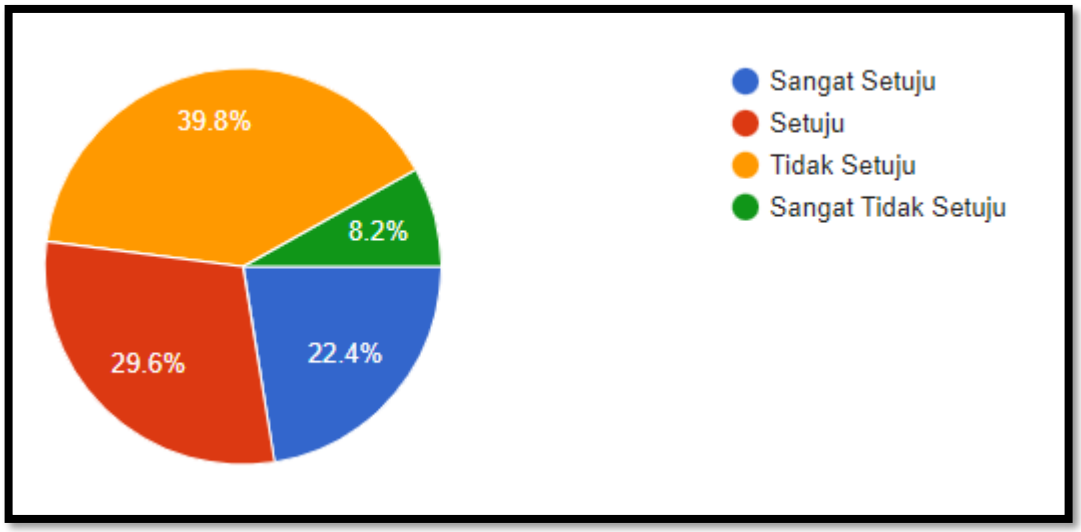

Gambar 23. Terdapat peningkatan skill pegawai setiap tahun setelah program pemberdayaan dilaksanakan

Berdasarkan data diatas bahwa sebagian pelaku home industry belum mampu dalam upaya peningkatan keterampilan setelah beberapa kegiatan pemberdayaan dilakukan. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara menyebutkan bahwa banyak kegiatan/program ketika sudah selesai maka tidak dijalankan lagi oleh pelaku home industry.Beberapa masalah lain misalnya ketergantungan masyarakat pada beberapa program bantuan social dibanding kegiatan pemberdayaan.

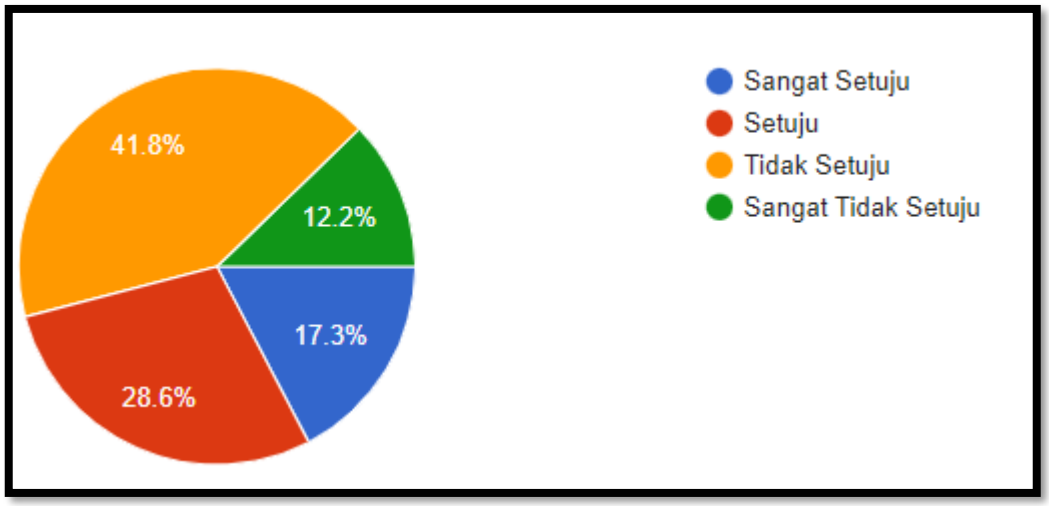

Gambar 24. Terdapat perubahan perilaku dan etos kerja setelah program pelatihan dilaksanakan oleh pemerintah

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa kebanyakan kegiatan pemberdayaan belum mampu mengubah perilaku dan etos kerja bagi para pelaku home industry. Namun bisa jadi karena kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan belum banyak partisipasi dari pelaku home industry. Oleh karena itu, dalam teori kolaborasi penting untuk memberikan pemahaman yang komprehensif kepada pelaku industry untuk menjadikan kegiatan pengembangan sebagai kewajiban dalam meningkatkan kualitas pada perilaku dan etos kerja.

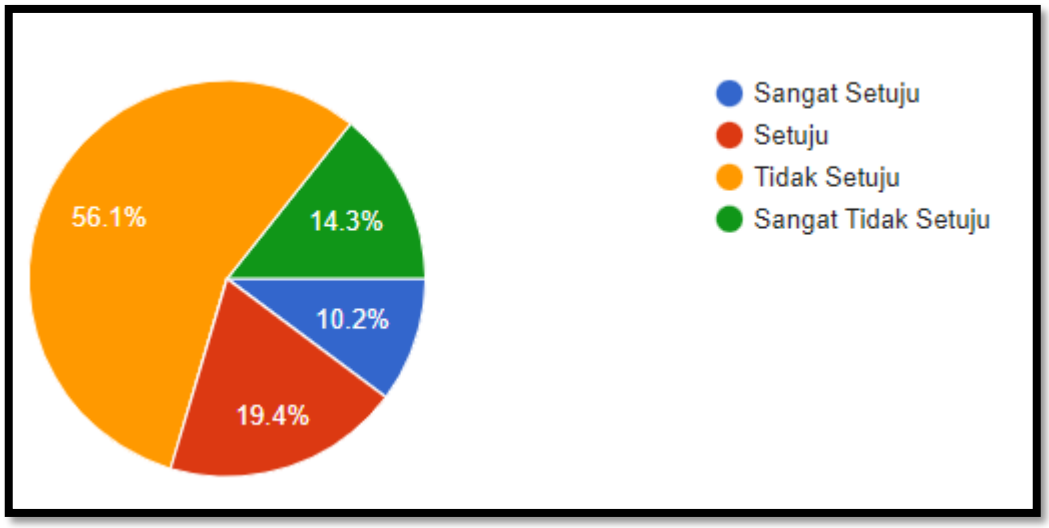

Gambar 25. Pelaku home industry dan pemerintah daerah mendapatkan hasil dari program pendampingan industry

Berdasarkan pada gambar diatas, menyebutkan bahwa pelaku home industry mayoritas beranggapan bahwa belum ada hasil yang didapatkan dari program pendampingan home industry. Oleh karena itu, komitmen dari pelaku industry maupun pemerintah menjadi sangat penting untuk diketahui hasil dari program pendampingan industry tersebut.

4.1.4 Hasil Survey Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat melalui Home Industry di Kota Tasikmalaya

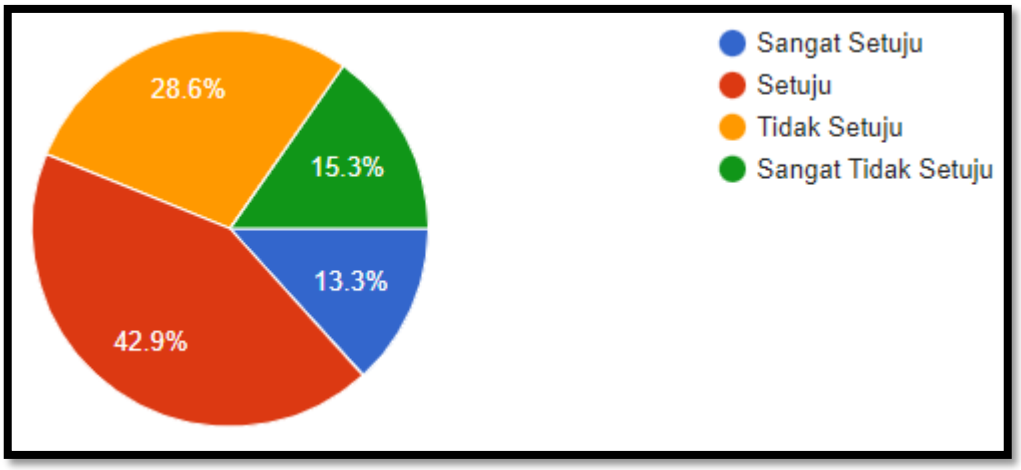

Gambar 26. Program pemberdayaan home industry sangat beragam

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa program pemberdayaan home industry sudah diketahui oleh pelaku home industry bahwa sangat beragam. Hal ini untuk menjangkau pengetahuan para pelaku home industry dalam memetakan kebutuhan pemberdayaan yang dimiliki. Melalui jawaban ini setidaknya memberikan informasi bahwa program pemberdayaan saat ini sangat banyak dan menjadi bagian dari kebutuhan para pelaku home industry dalam melihat tantangan global.

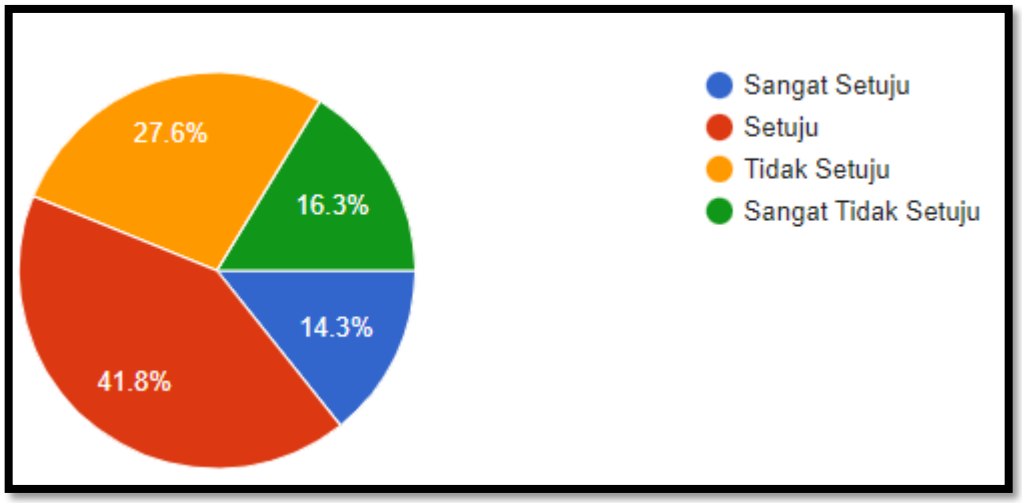

Gambar 27. Program pemberdayaan home industry telah dilakukan untuk menjangkau konsumen berbasis digital

Berdasarkan data diatas, menyebutkan bahwa mayoritas pelaku industry telah berupaya mengembangkan proses bisnis berbasis digital. Halini menjadi salah satu informasi berharga dalam mengembangkan konsumen yang tidak hanya secara konvensional. Berdasarkan hasil wawancara dengan pelaku home industry didapatkan bahwa penggunaan platform online untuk menjangkau konsumen dan tidak mampu bersaing dengan pelaku home industry lainnya.

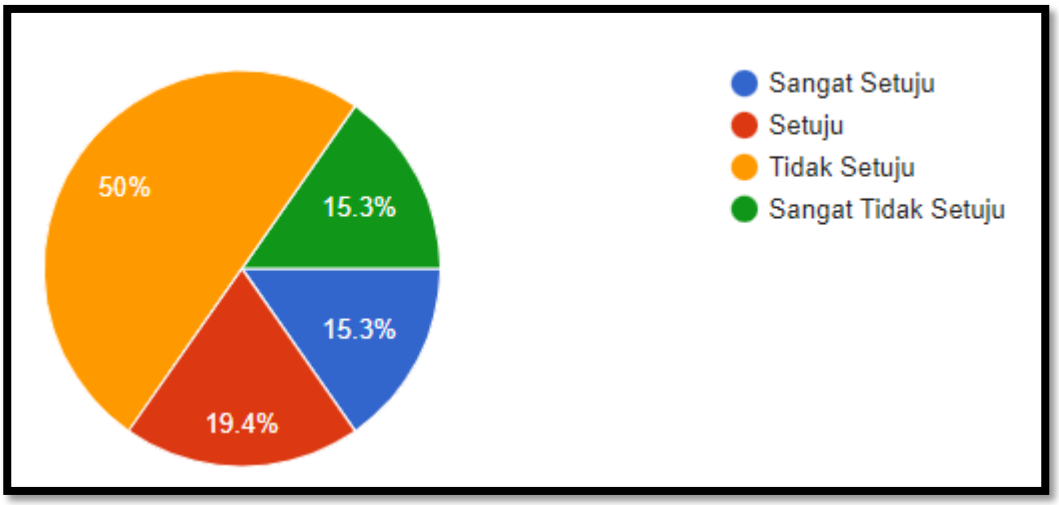

Gambar 28. Program pemberdayaan Home Industri telah dilakukan bersama pemerintah salah satunya adalah peningkatan kemampuan dan keterampilan.

Berdasarkan informasi diatas menyebutkan bahwa mayoritas pemberdayaan home industry belum dilakukan Bersama dengan pemerintah. Hasil wawancara menyebutkan bahwa terdapat beberapa pelaku home industry yang mengikuti kegiatan pemberdayaan dari perguruan tinggi atau kegiatan pemberdayaan dari swasta.

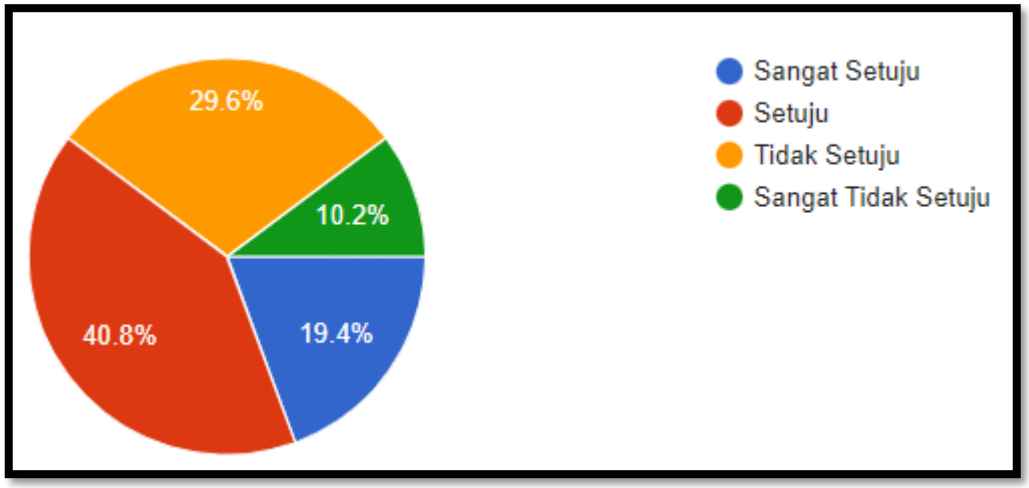

Gambar 29 Program pemberdayaan mampu mendorong inovasi dari pelaku home industry

Berdasarkan data diatas menyebutkan bahwa para pelaku home industry mayoritas setuju bahwa program-program pemberdayaan mampu mendorong inovasi dan memperluas peran pelaku home industry untuk berkontribusi dalam penanggulangan kemiskinan.

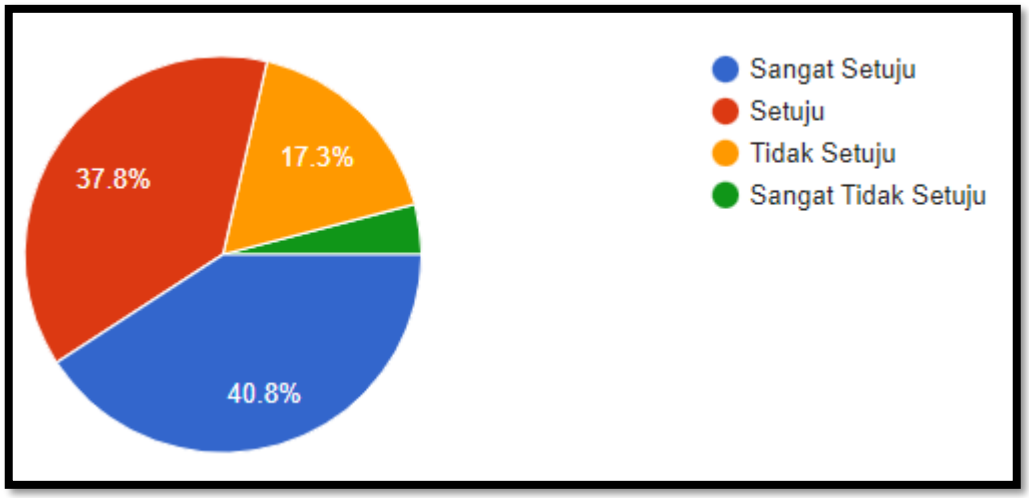

Gambar 30. Perlu ada kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat untuk pengentasan kemiskinan

Berdasarkan data diatas menyebutkan bahwa hamper seluruh pelaku home industry setuju bahwa perlu ada kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam pengentasan kemiskinan. Kegiatan kolaborasi ini perlu terimplementasi pada program-program pemberdayaan bagi pelaku home industry.

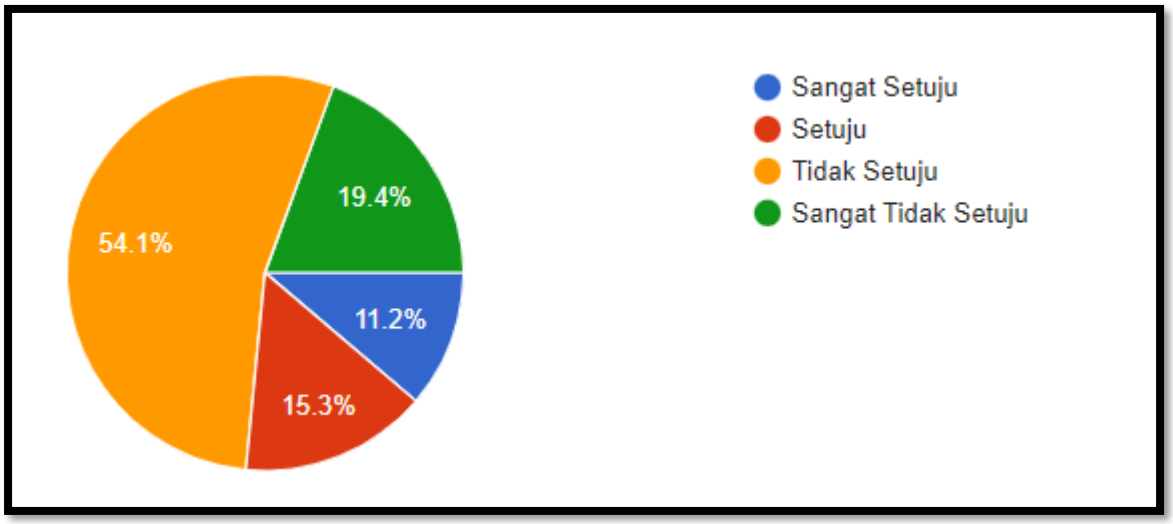

Gambar 31. Pemerintah membantu dalam mengembangkan manajemen usaha.

Berdasarkan data diatas, menyebutkan bahwa peran pemerintah dalam membantu mengembangkan manajemen usaha masih belum maksimal. Oleh karena itu sebagai pelaku home industry yang baru merintis tentunya membutuhkan pengembangan manajemen usaha yang akanmendukung pada kestabilan pendapatan home industry.

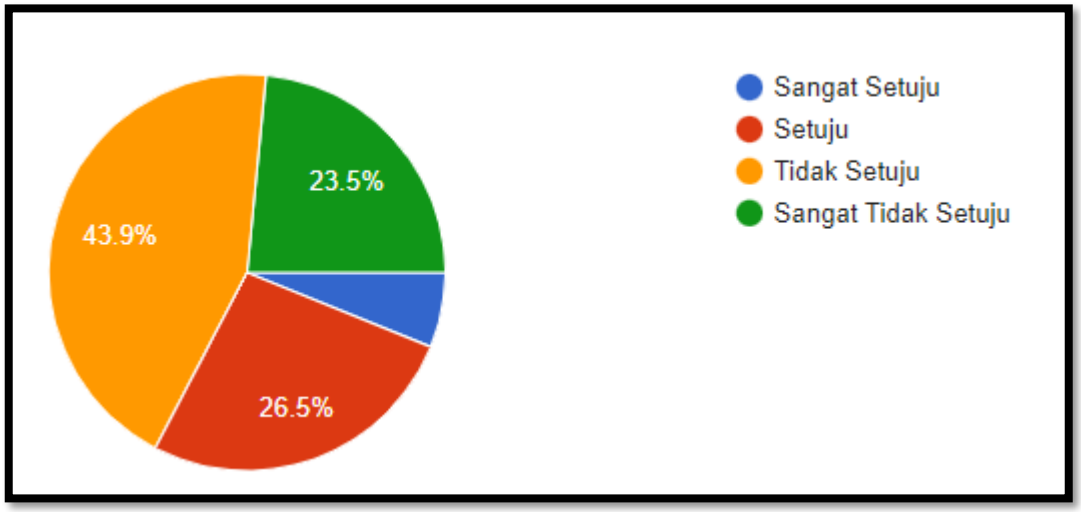

Gambar 32. Pemerintah membantu dalam mempertahankan keberadaan home industry pasca pandemic covid19.

Berdasarkan informasi diatas menyebutkan bahwa pasca covid 19 banyak pelaku home industry yang harus bersiap dalam mempertahankan usahanya. Oleh karena itu sangat penting perlu kolaborasi dengan berbagai stakeholders untuk menjalankan usaha dengan baik pasca covid 19.

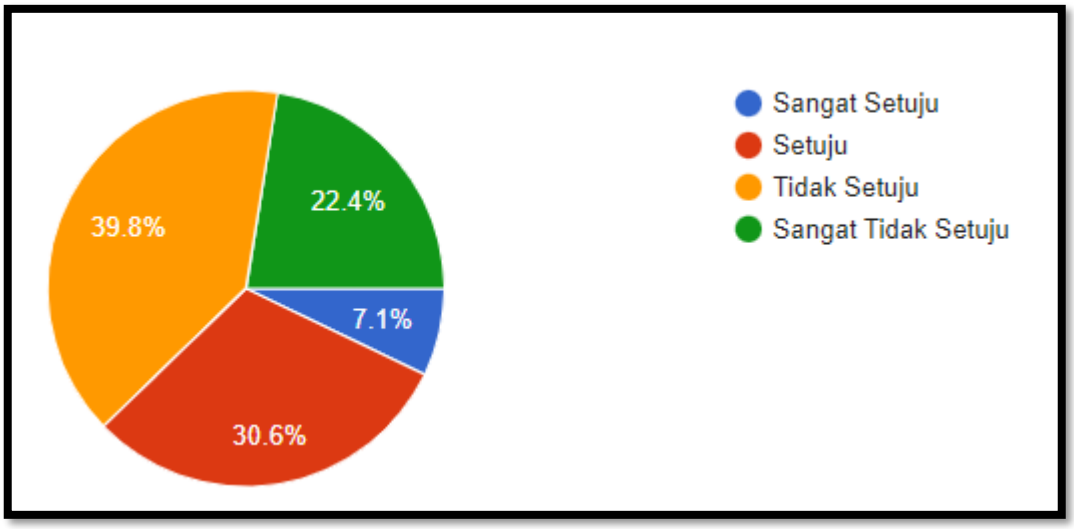

Gambar 33. Tersedianya akses terhadap modal untuk menambah jumlah produksi.

Berdasarkan data diatas menyebutkan bahwa para pelaku home industry sebanyak 37 % menyatakan bahwa tersedianya akses permodalan untuk menambah jumlah produksi. Namun menu 63 % masih kesulitandalam mendapatkan akses permodalan. Oleh karena itu, dibutuhkan sosialisasi dan pelatihan menganai akses permodalan bagi pelaku homeindustry.

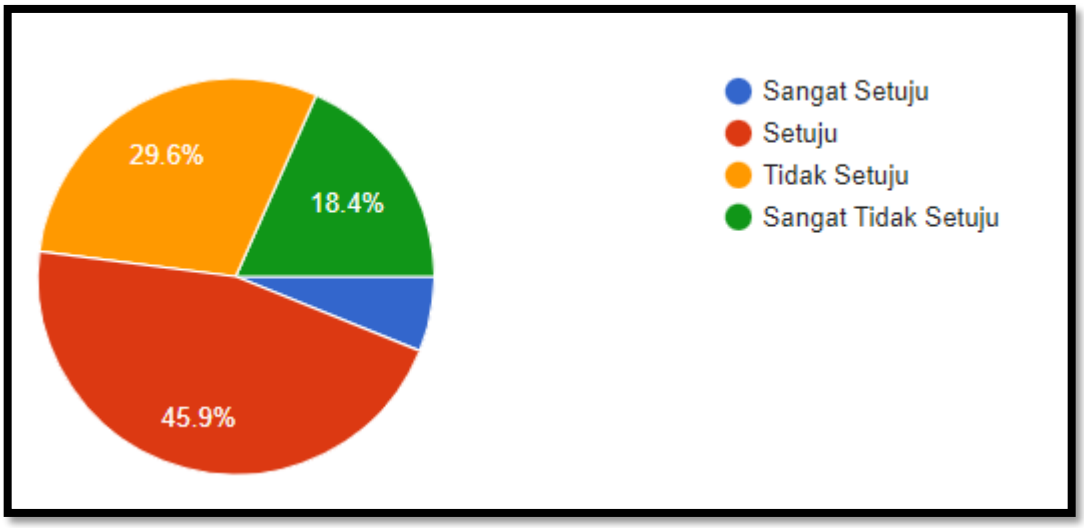

Gambar 34. Terjadi peningkatan jumlah pekerja setiap tahun.

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa terjadi peningkatan jumlah pekerja setiap tahunnya. Hal ini dapat menjadi peluang dalam berkolaborasi yaitu peningkatan program pemberdayaan agar dapat menjamin kualitas dari pekerja di home industry

4.2 PEMBAHASAN

Berdasarkan pertanyaan penelitian yang fokus pada aspek kolaborasi pemerintah dan pemberdayaan masyarakat, maka pembahan dalam penelitian ini membagi pada dua pembahasan yakni kajian kolaborasi dan pemberdayaan masyarakat.

Kajian Kolaborasi Pemerintah dalam Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Home Industry

A. Starting Condition (Kondisi Awal).

Kondisi awal ini menjadi salah satu indicator dalam kolaborasi untuk melihat kondisi atau penghambat dari kelompok kepentingan maupun Lembaga/organisasi. Peneliti perlu memahami dan mendeskrispsikan kondisi/kerjasama masa lalu antar Lembaga dan bentuk partisipasi masyarakat. Dalam konteks Kota Tasikmalaya, sebenarnya proses penanggulangan kemiskinan sudah diatur dengan jelas dalam Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2022 tentang penanggulangan kemiskinan. Dalam peraturan daerah ini dijelaskan bahwa Program Penanggulangan Kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, Pemerintah Daerah Kota, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi. Melalui aturan sudah sangat jelas bahwa perlu ada kolaborasi dari berbagai stakeholders.

Berdasarkan data hasil penelitian lapangan proses awal kolaborasi belum terjalin dengan baik antara berbagai kelompok kepentingan, masyarakat maupun pelaku industry. Kondisi ini dibuktikan dengan kurang pahamnya keberadaan program-program tentang home industry dan pelaku pendamping industry. Peran ini bisa dimaksimalkan dengan melibatkan pelaku home industry dalam proses perencanaan dan strategi program kerja. Perencanaan awal program kerja dapat

menjadi salah satu dimensi keterlibatan public dalam design komitmen Bersama. Kota Tasikmalaya yang telah memiliki Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) perlu menintegrasikan beberapa rencana program kerja dengan pelaku home industry. Berikut adalah beberapa program kerja yang berfokus pada penanggulangan masalah kemiskinan pada kegiatan pemberdayaan:

1. Pelatihan pembuatan business plan (perencanaan bisnis). Proses bisnis yang dilakukan UMKM perlu direncanakan dengan baik, mulai dari pemasaran produknya, mengelola keuangan perusahaan, merekrut karyawan, membeli bahan baku, dan mengelola produksi. Namun, jika pengusaha tidak dapat mengelola inventaris barang, memperkirakan produksi, dan membeli secara cepat dan akurat akan mengakibatkan produk kehabisan stok atau terjual pada waktu yang salah (Fauzi, 2021; Ramawisari, 2020).
2. Home industry juga dapat menjadi media masyarakat dalam mengembangkan kontribusi yang strategis terutama pada pembangunan ekonomi. Industri rumahan sebagai salah satu sector informal harus dipertimbangkan tenaga kerja yang professional.
3. Program penanggulangan kemiskinan yang difokuskan pada proses pemberdayaan masyarakat dapat diimplementasikan melalui pelatihan usaha, proses pemberian modal, serta keterampilan.
4. Program peningkatan jumlah wirausaha baru.
5. Program peningkatan produktivitas dan pendapatan keluarga berbasis komunitas sector perindustrian.

Dalam upaya memahami kondisi awal kolaborasi tentunya terdapat kesepatakan penentuan program kerja dan prioritas. Pentingnya memahami karakter atau masalah dalam usaha home industry sebagai berikut:

Gambar 4.1
Masalah pengelolaan home industry

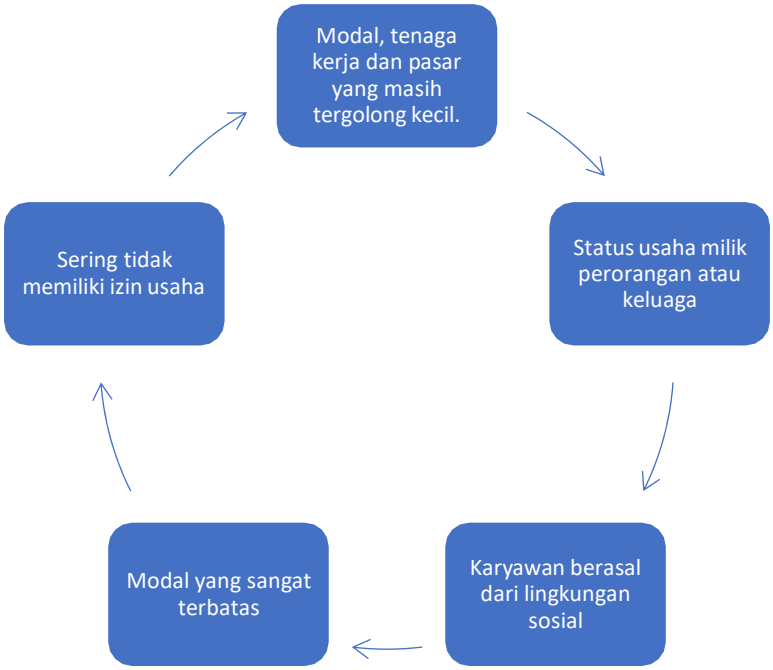

Sumber: (Hejazziey, Djawahir, 2009)

Terlaksanya pemberdayaan yang baik diperlukan untuk mengetahui dan memahami karakter atau masalah dalam usaha mikro sehingga mendapatkan solusi yang baik juga. Pada gambar diatas menunjukkan bahwa pemerintah Daerah perlu memahami permasalahan perkembangan home industry di Kota Tasikmalaya. Peneliti telah melakukan wawancara dengan pelaku home industry, terdapat beberapa kendala dalam mengelola home industry, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.1
Permasalahan Kolaborasi Pemerintah dan Pelaku Home Industry berdasarkan hasil wawancara

No.	Jenis Industry	Permasalahan
1.	Industri Alas Kaki (Kelom Geulis, Sandal, Sepatu)	1. Komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendapatan UMKM harus segera dilaksanakan secara praktiknya di lapangan 2. Penyediaan modal untuk para pelaku umkm 3. Penyediaan wadah untuk penampungan barang 4. Penarikan konsumen untuk para pelaku home industri 5. Penyediaan sarana atau wadah marketing yang dikelola oleh pemerintah 6. Peningkatan sarana pemasaran bagi para pelaku umkm 7. Peningkatan fasilitas UMKM untuk menjaga keamanan transaksi barang dengan konsumen 8. Pengoptimalan workshop yang sudah dibangun 9. Pasar kelom dan alas kaki sepatu kembali menjadi prioritas pemerintah sebagai sarana industry di Kota Tasikmalaya. 10. Pemerintah mampu memperhatikan industri rumahan yang baru merintis terutama bagi alas kaki kesehatan sangatlah besar dipasaran.
2.	Industri Bahan Bangunan	1. Perlu pemerataan pemberdayaan home industry. 2. Perlu keterlibatan peran pendamping home industry.
3.	Industri Barang Anyaman dari Tanaman Bukan Rotan dan Bambu, yaitu Mendong	1. Kebijakan yang dapat berorientasi bagi keberpihakan pengrajin 2. Penyediaan pasar yang jelas bagi anyaman mendong. 3. Penyuluh dapat memperhatikan aspirasi UMKM 4. Ketersediaan bahan baku yang mudah terutama bagi tanaman mendong. 5. Pentingnya monitoring dalam melakukan pendampingan untuk menghasilkan bahan baku bambu yang berkualitas. 6. Perlu kejelasan dana hibah UKM.
4.	Industri Batik	1. Memperluas pelatihan dan bantuan
5.	Industri Kayu dan Furnitur dari Kayu	1. Perlu akses komunikasi yang jelas antara pelaku home industry dengan pemerintah daerah. 2. Program bantuan yang tepat sasaran.
6.	Industri lain-lain	1. Pentingnya pelatihan yang berjenjang
7.	Industri makanan dan minuman	1. Memberikan pelatihan modal dan pemasaran produk. 2. Perlu bantuan pemerintah dalam menstabilkan harga bahan baku, karena home industry ini juga memakai jasa reseller.
8.	Industri Pakaian Jadi (Konveksi) dari Tekstil	1. Keterlibatan pemerintah dalam pendampingan untuk mengahilkan produk-produk inovatif. 2. Perlu kerjasama untuk mengurangi tingkat pengangguran. 3. Perlu memperhatikan harga bahan baku yang cenderung tidak stabil. 4. Perlu memperhatikan kestabilan harga bahan kain.
9.	Industri Pengolahan Lainnya, yaitu Payung Geulis	1. Perlu arahan pemerintah dalam peningkatan kemampuan sumber daya manusia

10.	Industri Percetakan	1. Perlu kerjasama dalam melakukan monitoring dan evaluasi home industry.

Sumber: Hasil wawancara dengan pelaku home industry di Kota Tasikmalaya, 2023.

Jika dilihat berdasarkan tabel diatas membuktikan bahwa terdapat ketergantungan antar actor dalam menjalankan pemberdayaan home industry. Oleh karena itu kondisi awal yang belum efektif dalam proses kolaborasi dapat dimanfaatkan dengan sharing peran antar instansi dan keterlibatan masyarakat dengan bottom up. Pemerintah daerah dapat memberikan proses kolaborasi awal dengan melakukan pendampingan setidaknya pada 4 dimensi berikut ini dalam proses pemberdayaan home industry:

Gambar 4.2.

Strategi Membangun Kolaborasi dalam Pemberdayaan Masyarakat



Sumber: Diolah dari berbagai sumber, 2023.

Strategi diatas untuk dapat dijadikan pemetaan tahap kondisi awal dalam relasi antar stakeholder, masing-masing aktor memiliki latar belakang yang berbeda yang dapat menghasilkan sebuah bentuk hubungan asimetris dalam relasi yang dijalankan. Artinya bahwa masyarakat sangat menggantungkan pendampingan home industry kepada pemerintah. Namun penelitian kuantitatif menyebutkan bahwa banyak pelaku home industry yang belum mampu

menjangkau keterlibatan sumberdaya pemerintah dan sejarah kerjasama sebelumnya. Oleh karena itu Dinas Koperasi, UMKM dan Perindag dapat menjadi salah satu actor kunci untuk menginisiasi kolaborasi dengan masyarakat maupun actor lain. Kondisi awal dalam suatu kolaborasi dipengaruhi oleh beberapa fenomena, yaitu para stakeholders memiliki kepentingan dan visi bersama yang ingin dicapai, sejarah kerjasama dimasa lalu, saling menghormati kerjasama yang terjalin, kepercayaan masing-masing stakeholders, ketidakseimbangan kekuatan, sumber daya, dan pengetahuan.

Gambar 4.3
Matriks keterlibatan actor untuk memahami peran dalam penanggulangan kemiskinan melalui pemberdayaan home industry.

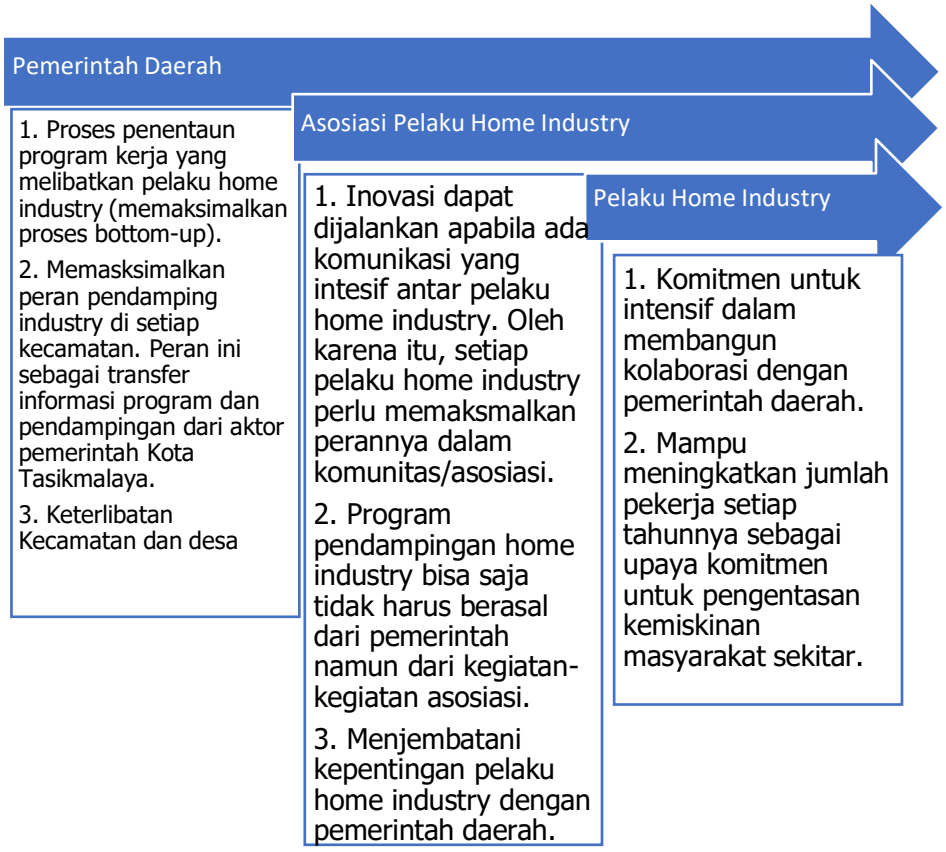

Sumber: Diolah penulis dari berbagai sumber, 2023.

Semakin sempitnya lapangan pekerjaan, home industry dapat menjadi salah satu solusi dalam upaya pengentasan kemiskinan. Misalnya Usaha industry bordir yang mendominasi di Kota Tasikmalaya dengan berbagai macam produk yang dihasilkan misalnya kerudung, baju kalong, koko, tunik, kebaya, mukena dan lain sebagainya. Keunikan bordir yang khas seperti adanya aksen bunga melati dapat dijadikan strategi khas keunikan home industry yang perlu dioptimalkan. Salah satu kecamatan yang mendominasi pada usaha bordir ini adalah Kawalu. Beberapa faktor yang mempengaruhi aktivitas home industri bordir yaitu : besaran modal, tenaga kerja, upah, mesin, teknik, pasar, persaingan. Namun saat ini usaha bordir harus berinovasi mulai dari pengolahan hingga pemasaran.

Mayoritas usaha bordir yang ada tentunya masih memunculkan banyak peroalan di lapangan. Misalnya masalah kemiskinan, pennganggguran atau bahwa perpindahan mata pencaharian. Secara nyata adanya usaha industry ini diharapkan mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang lebih luas. Perbaikan kualitas hidup harus sejalan dengan peningkatan pemberdayaan home industry. Home industry bordir tentunya juga sering mengalami dinamika pasang surut misalnya keterbatasan bahan baku, persaingan antar industy bordir lainnya sehingga dalam proses pemasaran akan terhambat. Sehingga keterlibatan peran stakeholder misalnya dalam proses pelatihan pemasaran akan mendorong para pelaku industry untuk meningkatkan kualitas bisnis.

Peneliti menganalisis bahwa Kota Tasikmalaya yang sering dijuluki sebagai kota industry kerajinan perlu memetakan tujuan persebaran focus wilayah industry dalam percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Beberapa factor yang berpengaruh terhadap perkembangan home industry di Kota Tasikmalaya antara lain inovasi dari pelaku industry dalam berinovasi dan menjawab tantangan pasar, dukungan dan ruang lingkup lingkungan industry, dukungan yang dilakukan oleh pemerintah maupun stakeholder lainnya untuk menghasilkan produk industry kerajinan serta kemajuan teknologi.

Disisi lain, Kawasan industry di Kota Tasikmalaya telah dikembangkan dengan memaksimalkan program industry terpadu melalui Pusat Pengembangan

Industry Kerajinan (PPIK). Pada Kawasan ini akan membantu kelompok industry untuk dapat memasarkan produk dan sebagai upaya menjalankan komunikasi antar industry. Misalnya program yang baru berjalan yaitu penyerahan sertifikat halal kepada 100 industry kecil dan menengah makanan olahan. Upaya mengembangkan program pusat industry ini harus mendapat dukungan yang meluas dari DPRD Kota Tasikmalaya, Dinas Koperasi, UMKM dan Perindag, para camat dan pelaku industry. Pusat Pengembangan Industri Kerajinan (PPIK) sebagai sarana pemberdayaan industry, antara lain pelatihan design produk, pemasaran dan strategi promosi, dan mendorong dalam penggunaan produk Indonesia khususnya berdaya saing tinggi. Program ini selaras dengan Visi yang dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Darah Kota Tasikmalaya (RPJPD) tahun 2005-2025, yaitu "Dengan Iman dan Takwa Kota Tasikmalaya Sebagai Pusat Perdagangan dan Industri Termaju di Jawa Barat".

B. Kepemimpinan dalam Berkolaborasi

Pemahaman kolaborasi perlu mendapatkan kepercayaan yang dapat diandalkan sebagai mediator. Jika dilihat dari peran home industry harus mampu berkontribusi sebagai koordinator yang menjembatani kepentingan home industry dan keterlibatan desa dan kecamatan dalam proses kolaborasi tersebut. Peran pendamping harus dipastikan berhubungan dengan keterlibatan dan keikutsertaan pelaku home industry secara aktif. Misalnya menurut (Theodorson dalam Mardikanto, 1993) menyebutkan bahwa partisipasi merupakan keikutsertaan atau keterlibatan seseorang dalam kelompok sosial untuk mengambil bagian dari kegiatan masyarakat di luar pekerjaannnya. Idealnya kepemimpinan yang inovatif dan mampu memfasilitasi masyarakat luas akan menjadi penguatan dalam pemberdayaan home industry. Berikut adalah peran dari kepemimpinan yang bisa dimaksimalkan di Kota Tasikmalaya:

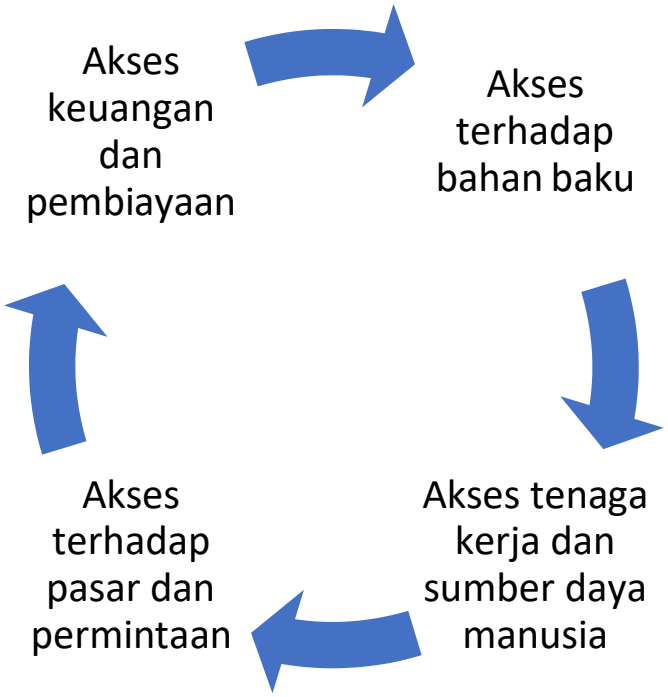

Gambar 4.4 Diolah dari berbagai sumber, 2023

Dalam kepemimpinan yang transformative dan berorientasi pada pemberdayaan. Maka diperlukan inovasi soal dalam konsep kolaborasi. Menurut Murray, et al (2013) memetakan proses penciptaan inovasi sosial dengan memberikan penekanan pada proses kolaborasi, baik pada level perencanaan maupun pada tataran implementasi inovasi sosial. Untuk mewujudkan inovasi sosial beberapa tahapan yang perlu dipahami, antara lain: Pertama, inovasi sosial dan masalah sosial perlu diidentifikasi untuk menemukan kondisi yang tidak ideal; Kedua, menghasilkan gagasan bersama, dengan bekerjasama dengan semua pemangku kepentingan untuk mencari kesesuaian dan persamaan pandangan terhadap suatu masalah sosial; Ketiga, mengukur dan menyesuaikan kapasitas dengan cara mengukur kemampun diri dengan melakukan studi kelayakan terhadap program yang akan dijalankan; Keempat, melakukan kerjasama berbasis kemitraan dengan melakukan pendekatan kolaboratif dengan berbagai relasi dari berbagai bidang, dan; Kelima, menghasilkan inovasi sosial, yang mampu memecahkan masalah sosial

dan berdampak baik terhadap masyarakat. Mulgan (2006) menambahkan adanya aspek learning and evolving dalam proses inovasi sosial.

C. Desain Institusional/kelembagaan

Dalam proses kolaborasi yang dibangun antar berbagai stakeholders tentunya juga dipengaruhi oleh pemahaman stakeholder terhadap aturan baru tentang penguatan kelembagaan home industry. Misalnya aturan mengenai cipta kerja yang berdampak pada pelaku home industry maupun UMKM. Pemahaman mengenai regulasi akan berpengaruh terhadap aturan main ketika akan berkolaborasi. Dalam proses collaborative governance Peran Dinas Koperasi, UMKM dan Perindag dalam proses kolaborasi dengan tujuan pemberdayaan masyarakat home industry dalam hal ini bertindak sebagai fasilitator dalam proses kolaborasi dengan menyediakan seluruh fasilitas dan kebutukan proses kolaborasi dari pelatihan, pengembangan kompetensi dan memahami kebutuhan pelaku industry. Kelembagaan dapat saling bekerjasama dengan melibatkan actor kecamatan, kelurahan atau bahkan komunitas.

D. Proses Kolaborasi

Dalam proses kolaborasi pelaksanaanya terdiri dari beberapa fase atau tahap agar proses kolaborasi dapat dijalankan secara maksimal. Artinya perlu ada komitmen dalam membangun diskusi, dialog dan komitmen. Mayoritas pandangan dari pelaku industry menyatakan bahwa setiap karyawan yang direkrut dan terjadi peningkatan membuktikan bahwa sudah ada pemahaman yang baik dari para pelaku home industry untuk penanggulangan kemiskinan. Namun, proses pelaksanaan program pemerintah daerah yang masih belum diketahui oleh pelaku home industry menyebabkan kesulitan dalam membangun kolaborasi yang ideal. Adapun model proses kolaborasi dapat digambarkan sebagai berikut:

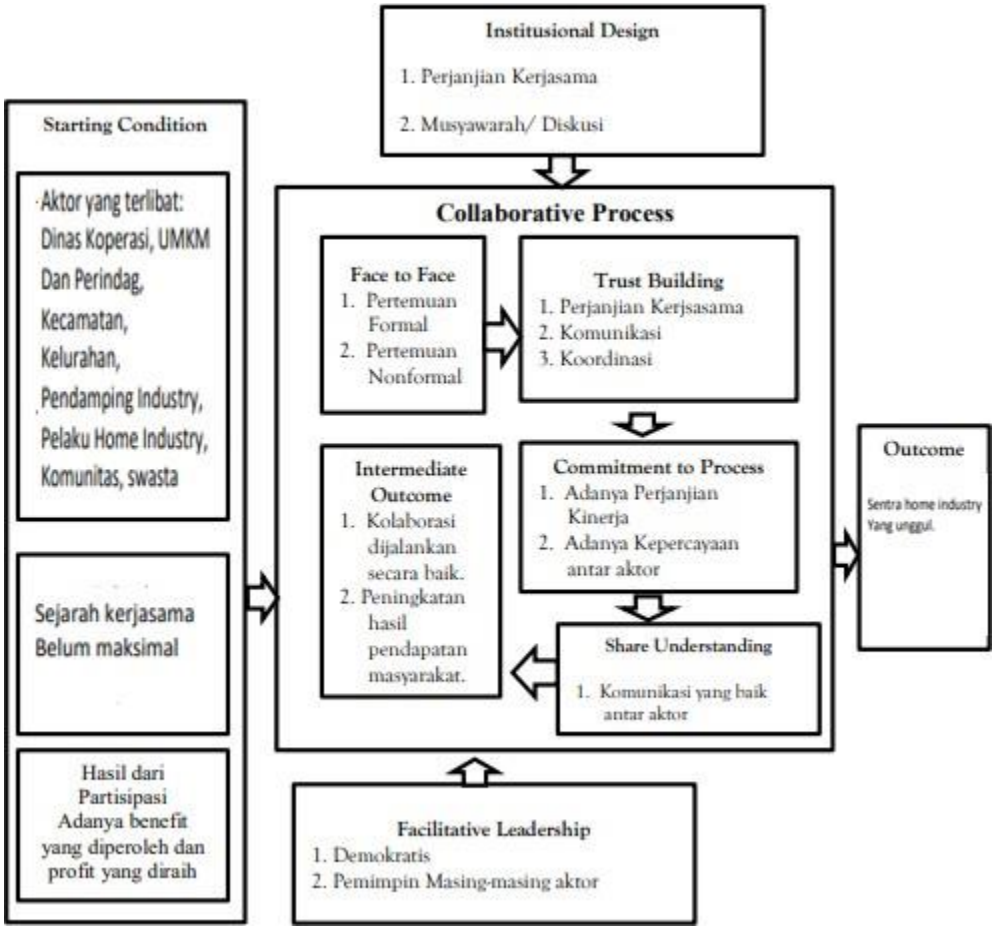

Gambar 4.5 Proses Kolaborasi pada home industry dan Pemerintah di Kota Tasikmalaya

Berdasarkan pada bagan diatas maka diperlukan proses kolaborasi yang efektif dalam pengentasan kemiskinan dengan strategi diatas antara lain sebagai berikut:

1. Kondisi awal

   Pemerintah daerah perlu terlibat dalam kegiatan pendampingan dan melakukan pemataan beberapa program antar SKPD yang terintegrasi dalam pengentasan kemiskinan. Selama ini setiap SKPD masih menjalankan program pengentasan kemiskinan masing-masing. Selain itu perlu membangun kepercayaan pada home industry maupun mengutamakan proses partisipasi. Misalnya memahami tentang upaya-upaya pengentasan kemiskinan dari kelompok home industry melalui pendekatan pelatihan-pelatihan yang diberikan pemerintah daerah.

2. Proses Kolaborasi

   Proses kolaborasi dapat dilakukan dengan pertemuan formal, non formal, melakukan perjanjian Kerjasama, kepercayaan antar actor dan menjalin kolaborasi antar actor. Pada tahapan ini bisa dilakukan dengan dialog, misalnya ditemui bahwa saat ini beberapa aspek home industry sulit mendapatkan pasar dan konsumen. Sehingga diperlukan strategi dalam menjaga eksistensi home industry tersebut.

3. Design Instutusisional

   Perlu melakukan kolaborasi dengan semua lini sector misalnya pemerintah kota, kelurahan maupun asosiasi.

4. Pemetaan outcome

   Menjalin kolaborasi perlu untuk melihat dampak pada setiap bentu kolaborasi yang dilakukan. Memetakan outcome perlu didasarkan pada kesamaan persepsi dan penggabungan program-program pengentasan kemiskinan dari semua SKPD yang ada

BAB V PENUTUP

5.2 KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi antaraktor dalam kebijakan pemberdayaan home industry di Kota Tasikmalaya belum terbukti berhasil untuk menyelesaikan permasalahan kemiskinan. Pandangan pelaku home industry yang belum memiliki persebaran manfaat yang luas dari program pemerintah. Pemberdayaan masyarakat dan kolaborasi antar actor harus didasarkan pada pemahaman sharing roles dalam meningkatkan perekonomian dan industry masyarakat setempat. Kondisi awal menunjukkan bahwa para pelaku home industry belum melibatkan peran pemerintah, pendamping industry dan kegiatan komunitas/asosiasi. Desain kelembagaan yang terbangun belum menunjukkan hasil yang memuaskan misalnya partisipasi aktif pelaku home industry, pertemuan rutin, selain itu peran kepemimpinan yang fasilitatif maupun inovatif sangat dibutuhkan oleh pelaku home industry. Hasil riset menyatakan bahwa belum ada hasil pendampingan dan pemberdayaan yang maksimal dari proses kolaborasi. Namun, pelaku home industry sudah memiliki komitmen yang sama dengan pemerintah bahwa setiap pekerja/karyawan yang ada pada home industry bertujuan untuk memberdayakan masyarakat sekitar dalam upaya berkontribusi pada penanggulangan kemiskinan dan pengangguran. Sehingga dalam pelaksanaan collaborative governance menurut Ansel dan Gash (2007) kolaborasi yang dilakukan dapat dikatakan belum berjalan secara sempurna. Padahal jika terdapat peran swasta, komunitas, pelaku home industry maupun pemerintah sendiri maka proses kolaborasi akan berjalan lebih baik.

5.3 Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa belum ada kolaborasi yang efektif antara para pelaku home industry, pemerintah maupun komunitas dalam proses penanggulangan kemiskinan. Dalam perspektif Collaborative

governance pelaksanaan kolaborasi masih belum sempurna karena belum adanya keterlibatan secara dominan 3 aktor utama kolaborasi yaitu Pemerintah, Masyarakat dan Swasta. Beberapa rekomendasi dalam memaksimalkan kolaborasi antara lain sebagai berikut:

1. Pemerintah melakukan proses penentuan kebutuahan program Bersama dengan pelaku home industry. Tujuannya adalah menjaring kolaborasi dari proses bottom-up.
2. Melakukan kegiatan pelatihan yang rutin dan terukur pada kelompok home industry.
3. Membangun komunikasi yang efektif dengan asosiasi agar dilibatkan dalam proses kolaborasi. Terutama disesuaikan dengan jenis industry.
4. Kegiatan pemberdayaan bersifat sustainable. Hal ini menjamin agar program pelatihan dan pengembangan tidak hanya sebatas pada pemenuhan implementasi program.
5. Kolaborasi antar stakeholders bertujuan untuk mengakomodasi akses keuangan dan pembiayaan, akses terhadap bahan baku, tenaga kerja dan sumber daya manusia, serta permintaan pasar
6. Kolaborasi perlu dimaksimalkan agar penanggulangan kemiskinan di Kota Tasikmalaya dapat dilaksanakan efektif melalui peran pelaku home industry.

Daftar Pustaka

Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative Governance in Theory and Practice. Journal of Public Administration Research and Theory, 18(4), 543–571. https://doi.org/10.1093/jopart/mum032

Aryad & Burhanuddin. (2023). Peran Home Industry "Tenunan Wanita Kreatif" dalam Meningkatkan Pendapatan Ekonomi Keluarga. Jurnal PenKoMi: Kajian Pendidikan dan Ekonomi, 6(1), 1-13.

Asmorowati, S., Schubert, V., & Ningrum, A. P. (2022). Policy capacity, local autonomy, and human agency: tensions in the intergovernmental coordination in Indonesia's social welfare response amid the COVID-19 pandemic. Journal of Asian Public Policy, 15(2), 213-227.

Aspiranti, T., & Amaliah, I. (2018). Determinant of Social Poverty in Mountainous Area of Talegong Garut Regency. MIMBAR: Jurnal Sosial dan Pembangunan, 34(1), 34-42.

Bahri, Z. (2013). Analisis Tingkat Keberhasilan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program PNPM Mandiri Perdesaan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Jurnal Paradigma Ekonomika, (April).

Bryson, Crosby, dan Stone (2006), "The Design and Implementation of Cross-Sector Collaborations: Propositions from the Literature

Fauzi, E. G., Syaharni, D. S., & Sirait, S. (2021). Kebijakan UMKM Nuriza Snack dalam Meningkatkan Produktivitas, Efisiensi, dan Pendapatannya. POINT: Jurnal Ekonomi Dan Manajemen, 3(2), 85-96.

Hejazziey, Djawahir. Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Melalui Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Untuk Mengentaskan Kemiskinan dan Pengangguran, Al-Iqtishad, Vol. 1 No. 1 Januari 2009, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah 2009), h. 38.

Hudayana, I., & Nurhadi, N. (2020). Memaknai Realitas Kemiskinan Kulturaldi Pedesaan: Sebuah Pendekatan Partisipatoris.Journal of Social Development Studies, 1(1), 14–26. https://doi.org/10.22146/jsds.205

Innes, J. E., Connick, S., Kaplan, L., & Booher, D. E. (2006). Collaborative governance in the CALFED program: Adaptive policy making for California water (No. 2006, 01). Working Paper.

Iskandar, S., Mahmud, A., & Muslim, M. (2015). Karakteristik dan Akar Masalah Kemiskinan, Kasus Pada 4 Tipologi Desa di Kabupaten Sumbawa. Jurnal Ekonomi Pembangunan: Kajian Masalah Ekonomi dan Pembangunan, 11(1), 122. https://doi.org/10.23917/jep.v11i1.338

Murray, R., Caulier-Grice, J., & Mulgan, G. (2010). The open book of social innovation. National Endowment for Science, Technology and the Art. https://doi.org/10.1371/journal. pcbi.0030166

Putra, R. E. (2007). Analisis terhadap Program-program Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat di Indonesia. Jurnal Demokrasi, 6(1).

Ramawisari, I. (2020). Analisis Biaya Logistik Dengan Menggunakan Konsep Supply Chain Management (SCM) Pada Produk Tikar Hasil Olahan Mendong (Doctoral Dissertation, Universitas Pasundan).

Rasdi, D., & Kurniawan, T. (2019). Efektivitas Kemitraan Pemerintah Dan Swasta Dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan: Sebuah Tinjauan Literatur. Sosio Informa: Kajian Permasalahan Sosial dan Usaha Kesejahteraan Sosial, 5(2), 97-112.

Riyansyah, F., Amiin, D. E. S., & Aziz, R. (2018). Pemberdayaan Home Industrydalam Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat. Tamkin: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam, 3(2), 87-109.

Salsabila, L., & Sadayi, D. P. (2022). Collaborative Governance dalam Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo. Dialektika Publik: Jurnal Administrasi Negara Universitas Putera Batam, 6(1), 28-34.

Suharto, E. (2009). Membangun masyarakat memberdayakan rakyat.

Sunyoto, Y. (2015). Kajian modal sosial dalam pengentasan kemiskinan. DHARMA EKONOMI, 17(32).

Theron, L C, & Theron, A. (2013). Positive adjustment to poverty: How family communities encourage resilience in traditional African contexts. Culture & Psychology, 3, 391–413.

TNP2K. (2018). For The First Time Since Financial Crisis Percentage of Indonesian Poors Are Below 10 Percent. TNP2K. http://tnp2k.go.id/articles/for-the-first-time-since-financial-crisis-percentage-of-indonesian-poors-are-below-10-percent.

Yulyanah, S., & Sarofah, R. (2019). Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir Untuk Pengentasan Kemiskinan Collaborative Governance InManagement Of Coastal Areas For Poverty Alleviation. 1–6

Yunus, M., & Parapat, E. P. S. (2021). Pemberdayaan Masyarakat dalam Menciptakan Kesejahteraan Keluarga melalui Budidaya Jagung di Desa Sarimatondang. Jurnal Ekonomi dan Bisnis (EK&BI), 4(2), 517-529.

LAMPIRAN

PERTANYAAN PENELITIAN

Variable	Indikator	Item	Jawaban
Starting Conditions	Ketidakseimbangan kekuasaan.	1. Program pemberdayaan home industry rutin dilakukan oleh Dinas Koperasi, UMKM dan Perindag Kota Tasikmalaya 2. Terdapat pendamping program pengembangan industry yang ada pada setiap kecamatan	4 = Sangat Setuju 3 = Setuju 2 = Tidak Setuju 1 = Sangat Tidak Setuju
	Insentif untuk berkolaborasi	3. Rutin mengikuti kegiatan asosiasi/perkumpulan untuk mendapatkan informasi tentang peningkatan pendapatan industry 4. Program-program tentang pendampingan home industry tidak hanya	

		berasal dari pemerintah daerah 5. Pemilik home industry mempekerjakan masyarakat miskin sekitar untuk membantu perekonomiannya	
	Sejarah Kerjasama	6. Pemilik home industry mendapatkan informasi yang jelas dari pemerintah daerah tentang program pemberdayaan 7. Ada komitmen dari home industry untuk meningkatkan pengetahuan baru setelah mendapatkan pelatihan dari pemerintah. 8. Pendamping home industry pada setiap kecamatan rutin mengadakan pertemuan.	

		9. Tidak ada hambatan dalam menjalin komunikasi dengan pemerintah.	
	Peran Pemimpin	10. Terdapat koordinator yang mampu menjembatani kepentingan home industry. 11. Desa/kecamatan sering terlibat dalam pengembangan home industry	
Desain Institusional	Dasar/Aturan/Konsensus dalam kolaborasi	12. Aturan terbaru tentang home industry dan UMKM sudah disosialisasikan.	
	Legitimasi	13. Memahami aturan tentang home industry/UMKM dapat mempermudah dalam melakukan kerjasama 14. Home Industry memiliki peran dalam pengentasan kemiskinan.	

Proses Kolaborasi	Dialog tatap muka	15. Home industry selalu berpartisipasi apabila ada tawaran pertemuan rutin dari pemerintah.	
	Membangun Kepercayaan	16. Terdapat kegiatan monitoring dari pemerintah untuk mengetahui dampak dari setiap program yang dilakukan	
	Komitmen terhadap proses	17. Setiap program pemberdayaan home industry dilakukan pemerintah untuk berkomitmen dalam pengentasan kemiskinan. 18. Terdapat peningkatan skill pegawai setiap tahun setelah program pemberdayaan dilaksanakan.	
	Pemahaman bersama	19. Terdapat perubahan perilaku dan etos kerja setelah program pelatihan	

		dilaksanakan oleh pemerintah	
	Hasil Antara	20. Pelaku home industry dan pemerintah daerah mendapatkan hasil dari program pendampingan industry.	

Program Pemberdayaan Home Industry

Variable	Indikator	Item	Jawaban
Pemberdayaan Masyarakat	Menciptakan suasana/iklim yang memungkinkan berkembangnya potensi masyarakat.	1. Program pemberdayaan home industry sangat beragam. 2. Program pemberdayaan home industry telah dilakukan untuk menjangkau konsumen berbasis digital	4 = Sangat Setuju 3 = Setuju 2 = Tidak Setuju 1 = Sangat Tidak Setuju
	Peningkatan kemampuan dan pengetahuan.	3. Program pemberdayaan Home Industri telah dilakukan bersama pemerintah salah satunya adalah	

		peningkatan kemampuan dan keterampilan. 4. Program pemberdayaan mampu mendorong inovasi dari pelaku home industry	
	Melindungi masyarakat dari kelompok lemah.	5. Perlu ada kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat untuk pengentasan kemiskinan .	
	Menyokong masyarakat agar tidak terjatuh kedalam keadaan dan posisi yang semakin lemah	6. Pemerintah membantu dalam mengembangkan manajemen usaha. 7. Pemerintah membantu dalam mempertahankan keberadaan home industry pasca pandemic covid19.	
	memelihara kondisi yang kondusif	8. Tersedianya akses terhadap modal untuk menambah jumlah produksi.	

		9. Terjadi peningkatan jumlah pekerja setiap tahun.	

PERTANYAAN KUALITATIF

No.	Indikator
	Kolaborasi dalam pengentasan kemiskinan
1.	Bagaimana upaya pengembangan potensi home industry di Kota Tasikmalaya
2.	Apa saja kendala dalam proses kolaborasi dengan para home industry?
3.	Apa saja bentuk-bentuk Kerjasama yang sudah pernah dilakukan antara instansi dan pelaku home industry?
4.	Bagaimana upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam membangkitkan peluang home industry pasca covid-19?
5.	Bagaimana bentuk-bentuk monitoring yang dilakukan instansi untuk tetap menjaga eksistensi dari home industry di Kota Tasikmalaya?
6.	Apakah ada program kegiatan khusus yang dibuat oleh instansi dengan melibatkan para home industry?
7.	Bagaimana kebijakan-kebijakan pimpinan yang mampu mendukung kolaborasi dengan para home industry?
8.	Bagaimana program pemberdayaan yang ingin dikembangkan di Kota Tasikmalaya? Terutama bagi pelaku UMKM.
9.	Apakah ada proses dialog rutin antara instansi dengan pelaku home industry?
10.	Apa saja indikator dalam memastikan program pemberdayaan yang sustainable/berkelanjutan?
11.	Bagaiamana instansi memastikan agar banyak masyarakat Kota Tasikmalaya yang terlibat dalam kegiatan home industry?
12.	Bagaimana evaluasi kebijakan dari program pemberdayaan home industry dalam pengentasan kemiskinan selama ini ?
	Kebijakan Pemberdayaan home industry
1.	Kebijakan seperti apa yang sedang dikembangkan oleh pemda dalam upaya memberikan peluang bagi home industry untuk keluar dari masalah kemiskinan?

2.	Apa saja program-program yang mampu memberikan peluang kemandirian bagi home industry?
3.	Bagaimana pengaruh dengan adanya home industry terhadap kesejahteraan masyarakat?
4.	Jelaskan program pendampingan seperti apa saja yang sudah dilakukan oleh pemda terhadap keberadaan home industry di Kota Tasikmalaya?.
5.	Apa saja kebijakan yang dilakukan pemda agar program pemberdayaan home industry dapat terlaksana secara merata dan mendukung pengentasan kemiskinan?

Data Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Kota Tasikmalaya

No	Nama	Jabatan	Kontak TLP	Wilayah Binaan
1	Nenden Kerliasari,ST., MT	Penyuluh Perindag Madya	081121188089	Kecamatan Indihiang
2	Hesti Praptiningsih , SH	Penyuluh Perindag Madya	0895416154292	Kecamatan Tamansari
3	Iyan Anwar Gunawan, S.Sn	Penyuluh Perindag Madya	081320700264	Kecamatan Kawalu
4	Agus Supriadi, S.Sn	Penyuluh Perindag Madya	081323699549	Kecamatan Mangkubumi
5	Arief Risnendar, S. TP	Penyuluh Perindag Madya	081774836989	Kecamatan Purbaratu
6	Cece Juniar, S. Sn	Penyuluh Perindag Muda	081915136066	Kecamatan Cibereum
7	Irni Kania Dewi, SE	Penyuluh Perindag Muda	08122300628	Kecamatan Tawang
8	Eli Triani Dewi Windiati, SE. M.Si	Penyuluh Perindag Muda	089663113117	Kecamatan Cihideung
9	Yeni Listyani, S. Sos	Penyuluh Perindag Muda	082318627644	Kecamatan Bungursari
10	Rika Sri Rahayu, SE	Penyuluh Perindag Muda	085320418777	Kecamatan Cipedes

DOKUMENTASI PENELITIAN










MILO CLICK
SENSATION





